



RENSTRA

Rencana Strategis 2024 - 2026

distanbun

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa, di Jawa Tengah perkiraan jumlah penduduk tahun 2022 berjumlah 37,032 juta jiwa (<https://jateng.bps.go.id/indicator>). Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian dan perkebunan yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian dan perkebunan diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Pandemi covid-19, walaupun telah empat tahun berlalu, akan tetapi dampak terhadap keseluruhan tatanan pembangunan nasional, termasuk di Provinsi Jawa Tengah, hal ini menyebabkan asumsi dan target pembangunan di Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 perlu melakukan strategi ulang. Pembangunan pertanian dan perkebunan diharapkan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang positif dengan perbaikan/perubahan strategi peningkatan produksi, produktivitas/provitas, penguatan nilai

tambah produk, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian dan perkebunan nasional yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani dan pekebun di Indonesia, termasuk di dalamnya di Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan pertanian dan perkebunan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi : peningkatan ketahanan pangan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional. Pertanian dan Perkebunan menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi cukup besar. Pembangunan pertanian dan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumberdaya, terjadinya perubahan iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan masih berdayanya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluhan. Guna mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang handal yang berjiwa wirausaha dan agribisnis. Satu diantara langkah yang ditempuh untuk mewujudkan SDM yang handal, diperlukan penyuluhan pertanian secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan penyuluhan pertanian yang berkelanjutan diperlukan kelembagaan penyuluhan yang kuat, karena kelembagaan penyuluhan pertanian mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna diperlukan adanya pendampingan/fasilitasi secara

terus menerus dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta wilayah binaan penyuluhan pertanian tingkat desa/kelurahan. Oleh karena itu revitalisasi penyuluhan pertanian dalam paradigma baru mutlak dilaksanakan dalam rangka memperkuat lembaga penyuluhan pertanian baik kelembagaan aparatur, pelaku utama dan pelaku usaha yang terintegrasi dan berkelanjutan di kabupaten/kota, yang berfungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pembinaan SDM pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP-D), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D). Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Akan tetapi terkait dengan rencana pergantian pemimpin nasional di tahun 2024, maka khusus Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu tetap 1 (satu) tahun. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

mengamankan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bersama-sama dan serentak pada tahun 2024. Sementara itu kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada periode 2018 – 2023 akan berakhir tahun depan. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah tidak akan memiliki Gubernur definitif hasil pemilihan kepala daerah dan akan digantikan oleh Pj. Gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur Jawa Tengah yang baru melalui pilihan kepala daerah.

Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menginstruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah transisi. Menindaklanjuti hal itu, agar pembangunan terus berjalan maka perangkat daerah perlu menyusun renstra yang selaras dengan dokumen RPD pada tingkat daerah provinsi.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk jangka menengah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Khusus masa transisi ini, penyusunan Renstra PD juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021. Agar dapat memudahkan seluruh PD di Jawa Tengah dalam penyusunan Renstra PD, maka perlu panduan penyusunan Renstra PD. Panduan ini berisi tentang substansi yang harus diacu dalam menyusun Renstra PD, mekanisme penyusunan, sistematika, tata cara penyajian, serta jadwal penyusunan.

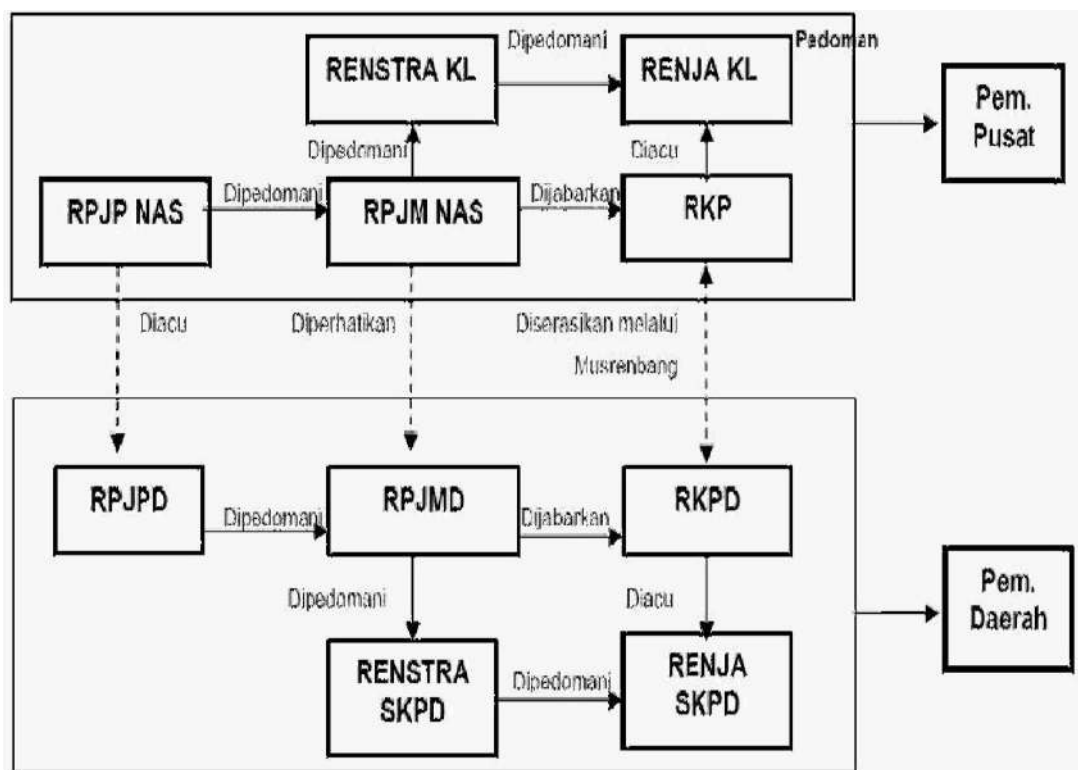
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2024-2026 bukan merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, hal ini karena belum ada Gubernur yang terpilih, akan tetapi berdasarkan kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diarahkan pada tujuan "**Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari**" yang ditunjukkan dengan kemiskinan yang semakin menurun, pendapatan per kapita yang semakin meningkat, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat, dengan sasaran meliputi : (1) meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan, (2) meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, (3) meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta (4) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memuat beberapa hal : (1) arah kebijakan keuangan daerah; (2) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya RPD tersebut, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan kegiatan operasional dalam rangka menangani isu strategis serta peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, sebagai dokumen guna memberikan arah Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Jawa

Tengah dalam jangka waktu tahun 2024-2026. Adapun pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. Dokumen RPD Provinsi Jawa Tengah tidak berbeda dengan RPJMD terkait posisinya dengan regulasi lainnya. RPD 2024-2026 selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektor lainnya, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota lainya yang berbatasan. RPD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Gambaran keterkaitan RPD dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
9. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
10. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3586);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
40. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 3599/Kpts/DP.310/10/ 2009 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura.
41. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 124/Permentan/ OT:140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.
42. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 125/Permentan/ OT:140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ini juga merupakan kelanjutan Rencana strategis lima tahun sebelumnya, yaitu 2018-2023, sehingga juga masih memiliki karakteristik yang sama seperti lima tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut : **pertama** lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis; **kedua** memberikan arah pembangunan dan **ketiga** lebih berorientasi pada tindakan antisipatif.

Sebagai dokumen perencanaan yang menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu tahun 2024 -2026. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai arahan strategis pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arah pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, sebagai acuan bagi para pelaku pembangunan pertanian dan perkebunan;
- 2) Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan;
- 3) Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi awal sampai akhir pelaksanaan program.

1.4. Sistematika Penulisan

Selaras dengan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Negeri, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab I menguraikan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah

Bab II menguraikan gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang memuat peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, serta menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya beserta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Bab III menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan, tujuan, sasaran dan program kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah,

telaahan renstra K/L, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab IV menguraikan tentang pembangunan pertanian dan perkebunan jangka menengah daerah tahun 2024 – 2026 yang merupakan kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada tujuan "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" Pada bagian ini juga diuraikan *tujuan dan sasaran*, serta kebijakan dari setiap strategi yang terpilih sebagai rumusan pembangunan pertanian dan perkebunan guna mencapai tujuan dan sasaran renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab V menguraikan kesinambungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, tujuan dan sasaran, serta kebutuhan pendanaan indikatif.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VI memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VII memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk indikator kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang

telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

Bab VIII. Penutup

Bab VIII ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Untuk Struktur Organisasi UPT berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan. Struktur Organisasi pada Tabel 2.1.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
4. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan,

Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha, UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian tugas sebagai berikut :

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi;
6. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi, alat mesin dan pupuk dan pembiayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan dan irigasi;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat mesin;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan; dan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi, jagung dan sereal lainya dan aneka kacang dan umbi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Budidaya Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan sereal lainya;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran, tanaman buah serta tanaman hias dan tanaman obat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah;

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim, tanaman tahunan, rempah dan penyegar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman rempah dan penyegar; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha

Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, pasca panen dan bina usaha..

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pasca panen, pengolahan dan mutu;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha dan pemasaran; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Balai Pelatihan Pertanian

Balai Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Balai Pelatihan Pertanian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelatihan dan bimbingan teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan perkebunan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pelatihan dan bimbingan teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan perkebunan;
3. Evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan dan bimbingan teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan perkebunan ;
4. Pengelolaan ketatausahaan ;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
4. Pengelolaan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah Semarang dan Wilayah Surakarta.

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah Semarang dan Wilayah Surakarta mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang tanaman pangan dan hortikultura

Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah Semarang dan Wilayah Surakarta melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura;
2. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura ;
3. Evaluasi dan pelaporan dibidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura
4. pengelolaan ketatausahaan ;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Balai Benih Tanaman Perkebunan

Balai Perbenihan dan Kebun Produksi mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perbanyak benih tanaman perkebunan, percontohan kebun produksi dan pemanfaatan aset di kebun dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman perkebunan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman perkebunan;
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan kebun produksi tanaman perkebunan;
4. Pengelolaan ketatausahaan dan;
5. Pelaksaaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

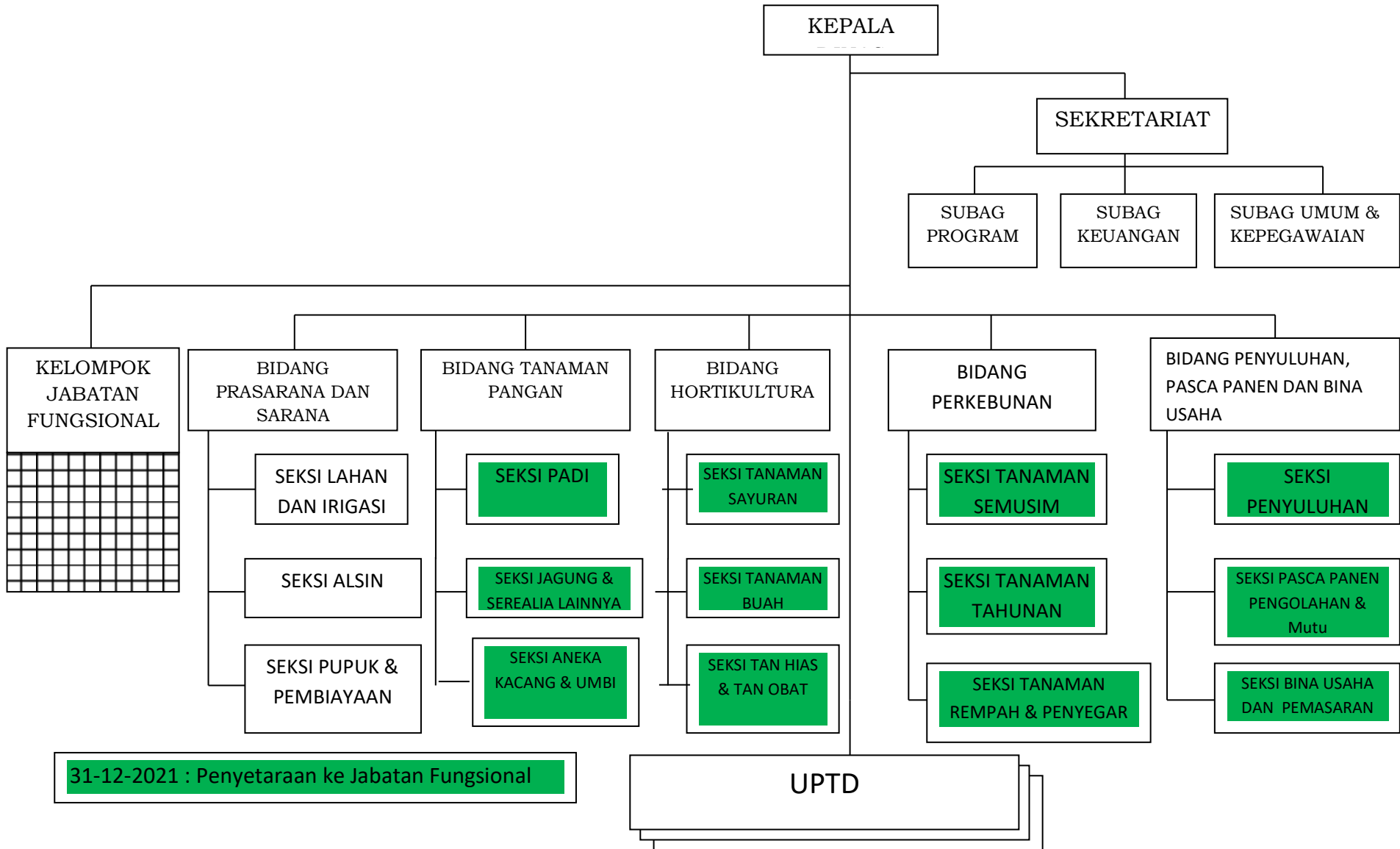
1. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pangan, dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang perlindungan tanaman pangan, dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura ;
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan, perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura ;
4. Pengelolaan ketatausahaan ;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

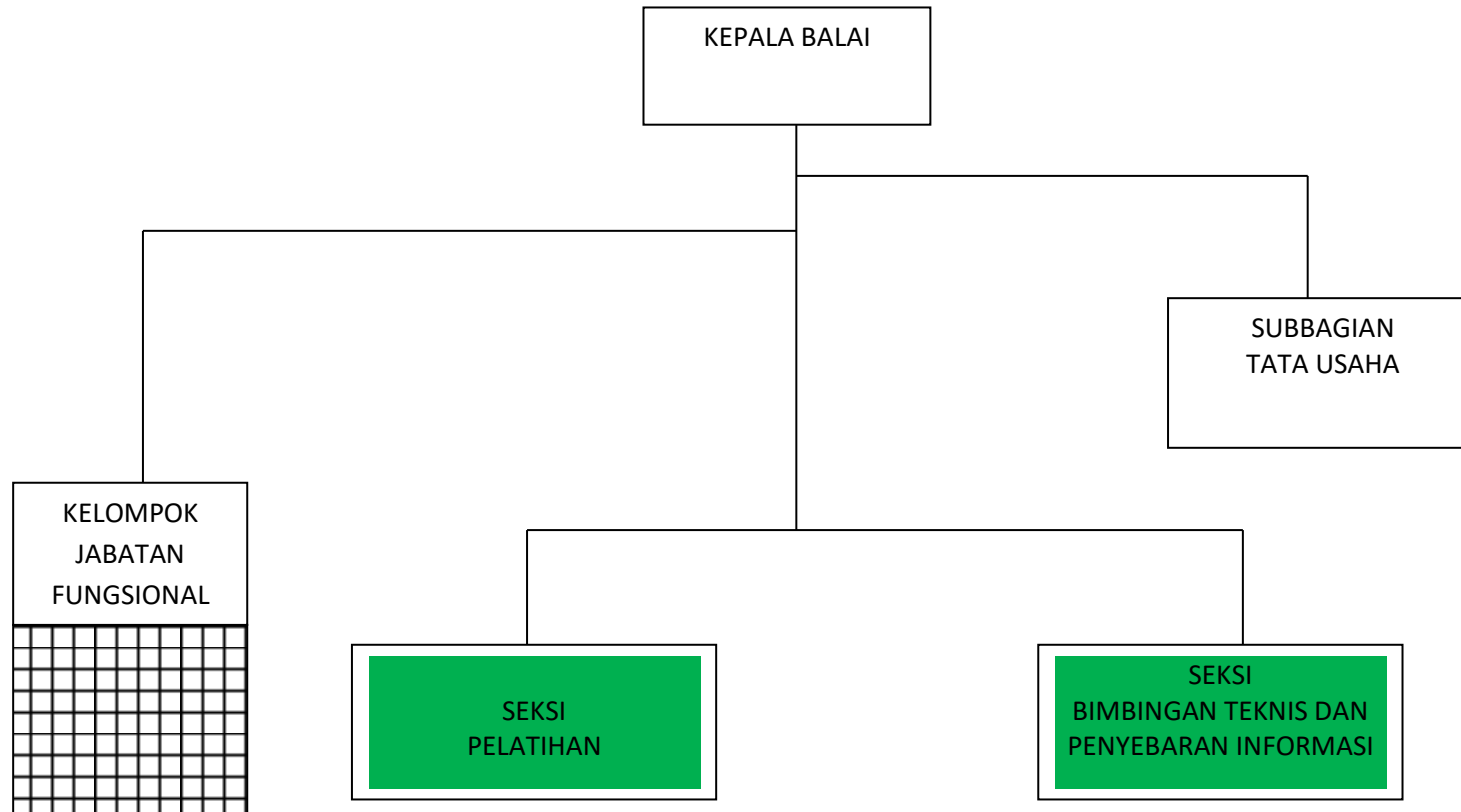
Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang ada pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
2. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP);
3. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP);
4. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT);
5. Jabatan Fungsional Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT);
6. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (PAMP);
7. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur;

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

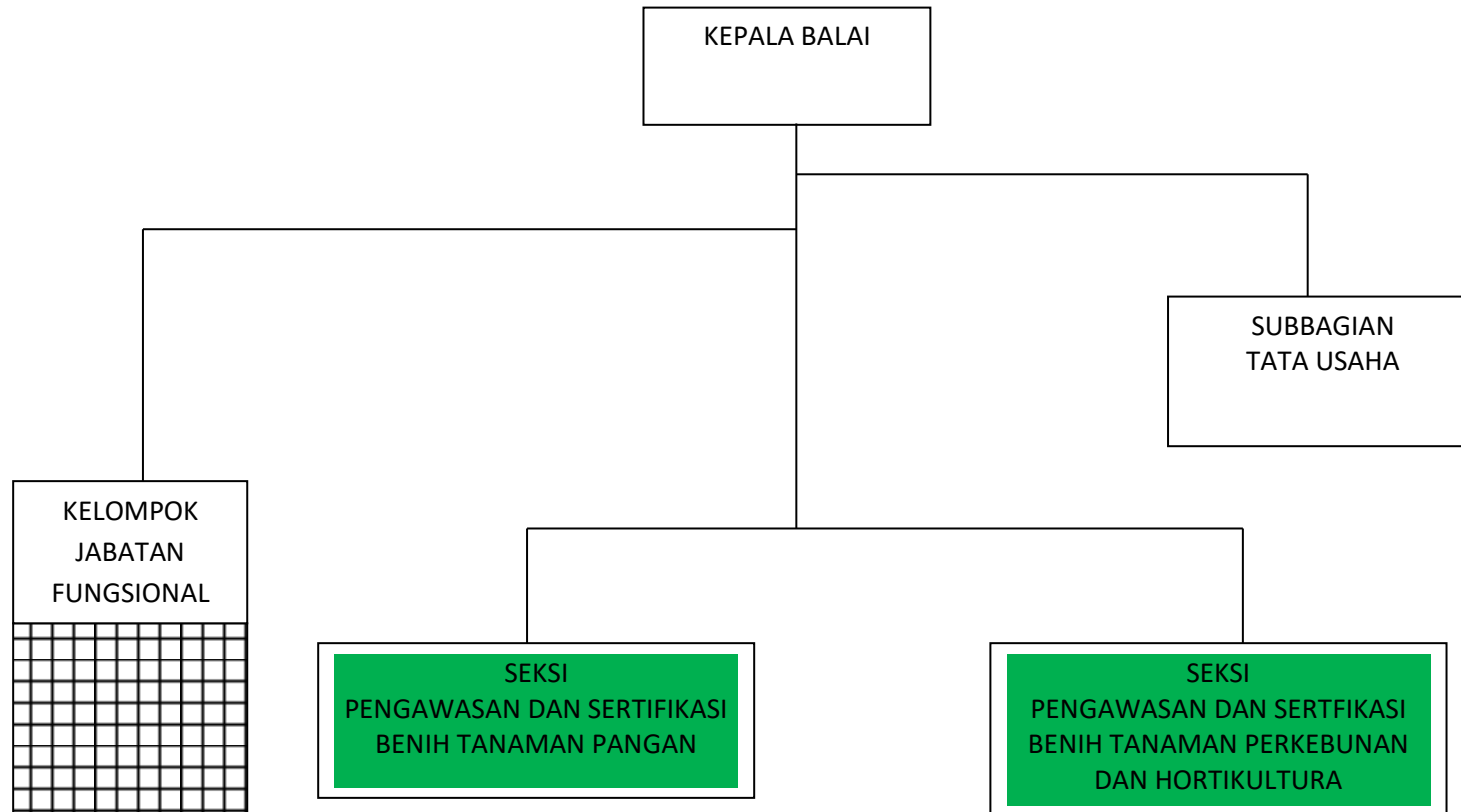


Struktur Organisasi Balai Pelatihan Pertanian



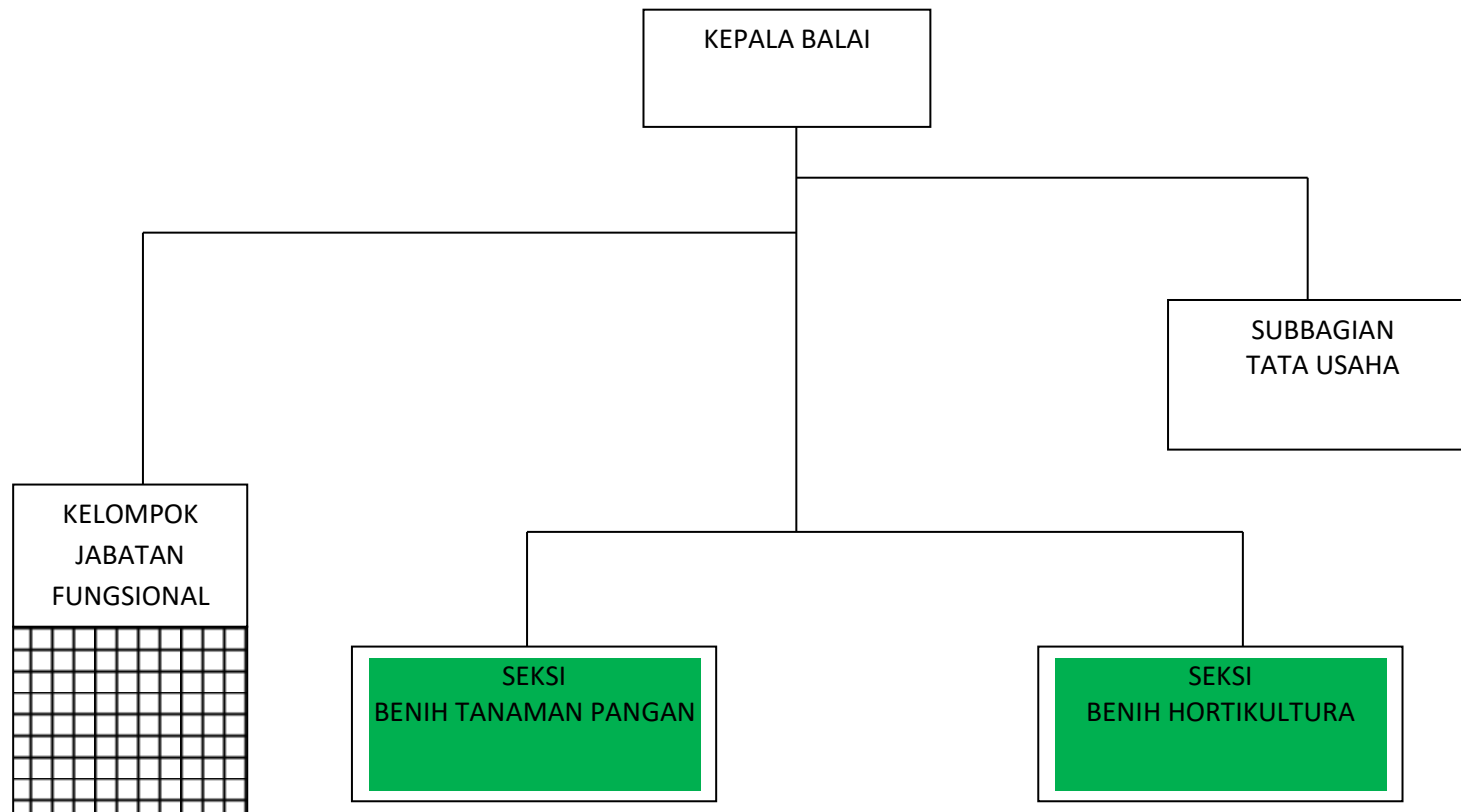
31-12-2021 : Penyetaraan ke Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih



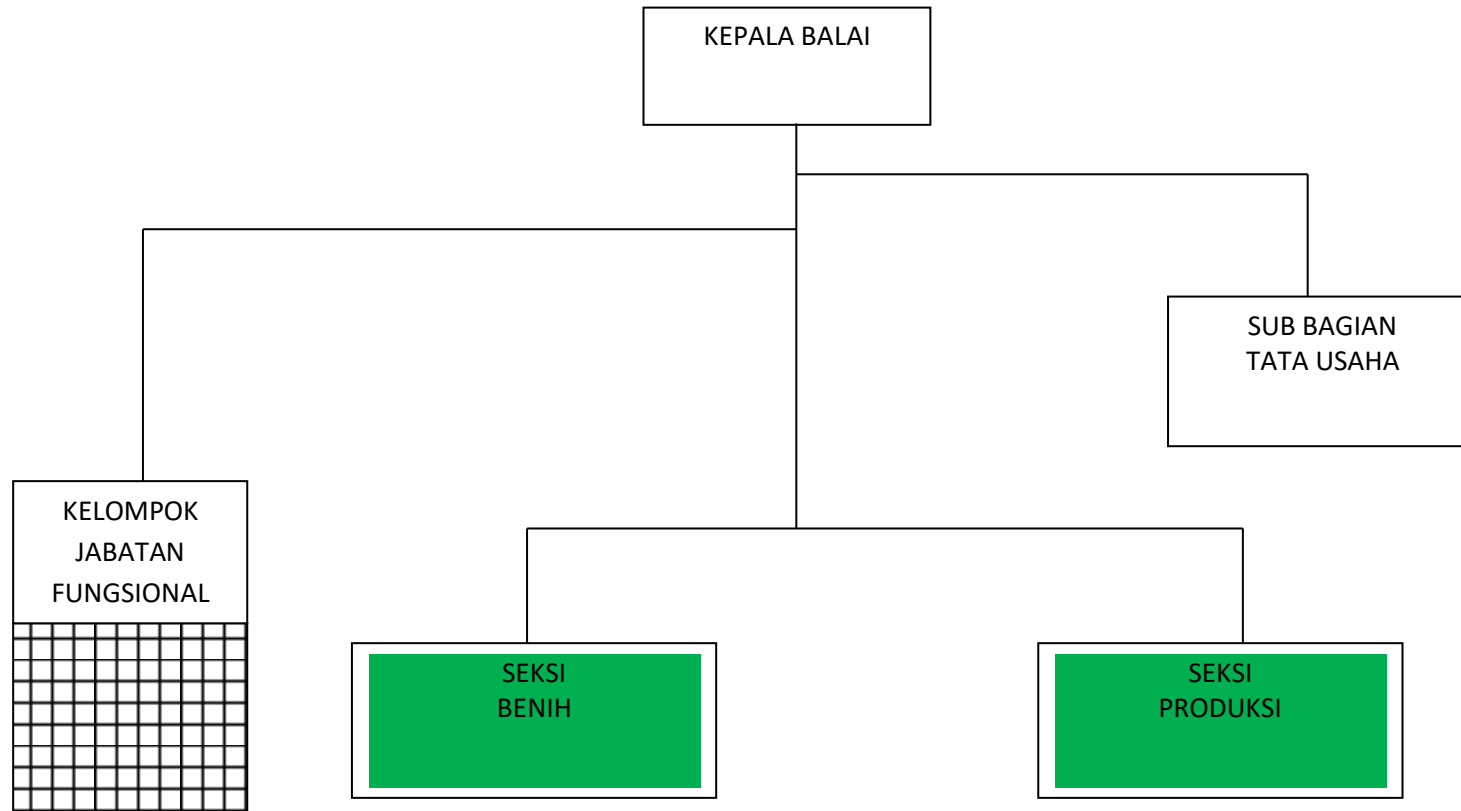
31-12-2021 : Penyetaraan ke Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang, Surakarta dan Banyumas



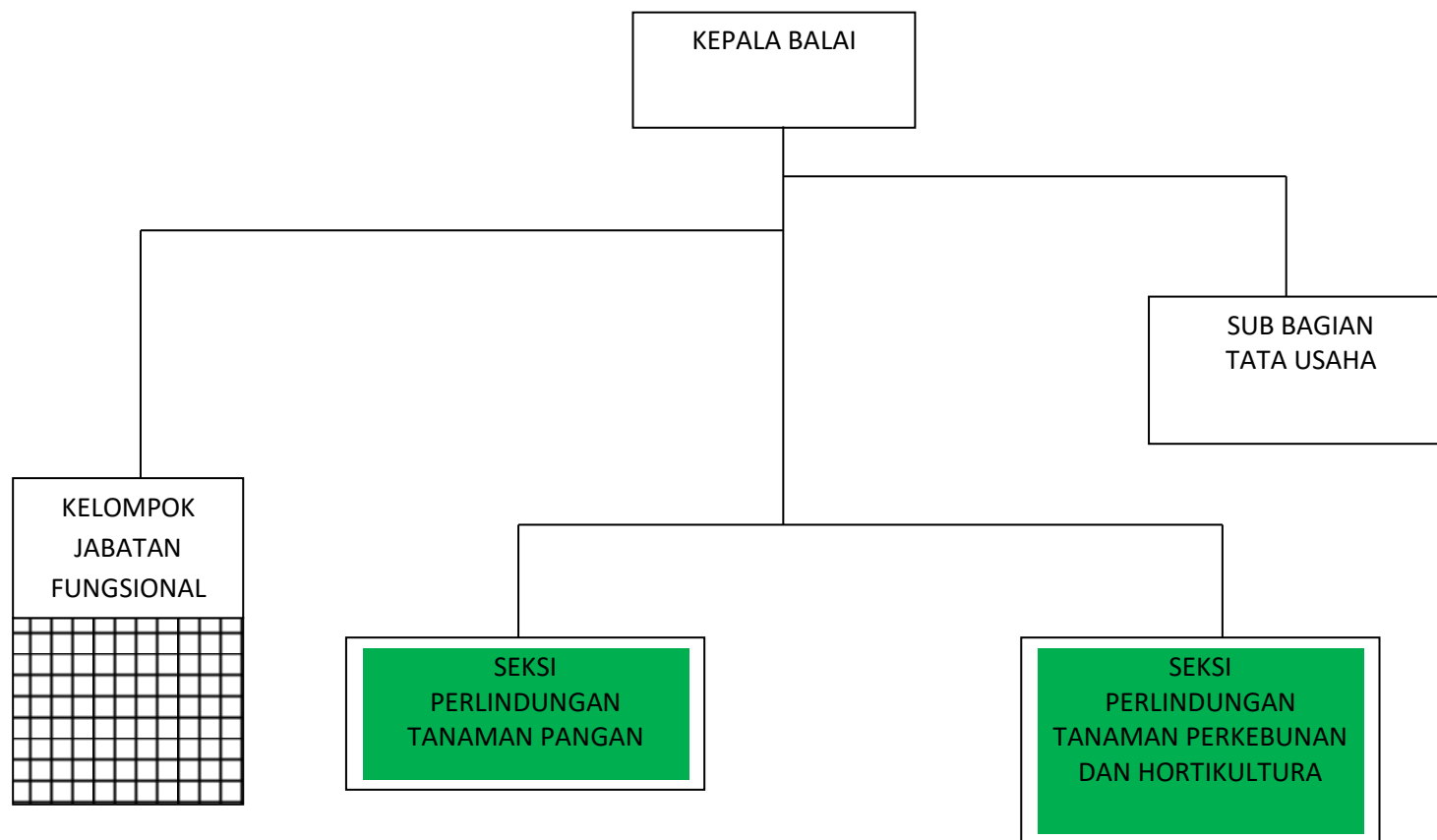
31-12-2021 : Penyetaraan ke Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Perkebunan



31-12-2021 : Penyetaraan ke Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan



31-12-2021 : Penyetaraan ke Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Dalam konteks pembangunan daerah, pembangunan pertanian dan perkebunan memiliki posisi kunci, karena potensi sumberdaya manusia dan alam sebagai asset utama pembangunan berada dalam sektor tersebut. Namun demikian potensi tersebut belum optimal, disebabkan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia pertanian dan perkebunan terdiri : aparat pemerintah termasuk petugas lapangan (penyuluh, pengamat organisme pengganggu tumbuhan dan pengawas benih) :

- Jumlah aparat Dinas Pertanian dan perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2023 sebanyak 610 orang PNS. Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat lulusan Pasca Sarjana (S3) sebanyak 1 orang, (S2) sebanyak 50 orang, Sarjana/Diploma IV (S1/DIV) 253 orang, Sarjana Muda/DIII 83 orang, DII/D1 6 orang, SLTA 202 orang, dan SLTP 20 orang sertalulusan SD 13 orang.
- Kompisi pegawai terdiri dari pejabat struktural 53 orang yang terdiri dari Eselon II (1 orang), Eselon III (13 orang), Eselon IV (39 orang), sedangkan jumlah pejabat fungsional yang Satuan Administrasi Pangkal (SATMINGKAL) pada Dinas Pertanian dan perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebanyak.....orang terdiri :
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 22 orang;
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 7 orang;
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP) , jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 2 (dua) orang;
 - d. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT), jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 86 orang;
 - e. Jabatan Fungsional Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 120 orang, PPPK (Formasi Penyuluh Pertanian) sebanyak 75 orang dan Tenaga Bantu POPT sebanyak 99 orang;
 - f. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (PAMP), jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 1 (satu) orang;
 - g. Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur, jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 1 (satu) orang;

- Jumlah Non ASN yang penghasilannya bersumber dari Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, baik pada unit eselon III dan Pihak III (Outsorsing) sebagai berikut :

1. Non ASN (Non Outsorsing) berjumlah 165 orang yaitu :

No	Lokasi/ Penempatan	Jumlah (orang)		Jumlah (orang)	Sumber Biaya	Ket
		Teknis	Non Teknis			
1.	Sekretariat			16	APBD	
2.	Bid. TP	4	4	8	APBD	
3.	Bid. Hortikultura			3	APBD	
4.	Bid. Perkebunan			3	APBD	
5.	Bid. P2BU			15	APBD	
6.	Bid. PSP			11	APBD	
7.	BBTPH Wilayah Banyumas	28	-	28	APBD	
8.	BBTPH Wilayah Semarang	20	0	20	APBD	
9.	BBTPH Wilayah Surakarta	20	3	22	APBD	1 K2
10.	BPTPHBun	6		6		
11.	Balai Benih Tanaman Perkebunan	29	-	29	APBD	
12.	Bapeltan	0	0	0		
13.	BPSB Tegalondo	4	0	4	APBD	
	Jumlah					

2. Non ASN (Outsorsing dengan pihak III) berjumlah 95 orang yaitu :

- Tenaga Kebersihan : 26 orang
- Driver : 3 orang
- Pramu bakti : 3 orang
- Sekurity/Keamanan : 63 orang

Sedangkan untuk sumberdaya sarana prasarana pendukung bagi aparat untuk menunjang pembangunan pertanian dan perkebunan masih terbatas terutama bagi aparat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai berikut :

a. **Balai Pelatihan Pertanian terletak di Pringsurat Soropadan, Temanggung**

Fasilitas yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Fasilitas Kantor	Jumlah (Lokal/unit/set)	Keterangan
1	Gedung Administrasi	2	-
2	Asrama	4	174 orang
3	Ruang Makan	3	250 orang
4	Gedung Serbaguna	1	200 orang
5	Gudang alsin	1	-
6	Lab. Pengolah Hasil	1	
7	Lab. Agensia Hayati	1	
8	Kebun (Lahan Praktek) :		-
	- Lahan Kering (tegalan)	12.628 m ²	-
	- Lahan Sawah	8.387 m ²	-
9	Kolam Ikan	3	-
10	Kandang Ternak	1	-
11	Guest House	-	-
12	Tempat Ibadah	1	300 orang
13	Lapangan Olahraga	2	-
14	Rumah Dinas	12	-
15	Ruang Kelas	4	160 orang
16	Cottage	5	10 kamar / 30 orang

Sumber : Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan Soropadan, 2022

b. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) berada di Jl Solo – Yogyakarta Km. 15 Sragen, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Bangunan yang dimiliki berupa gedung permanen (kantor induk), gedung laboratorium pengujian mutu benih, dan gedung kantor 6 Pos Pengawas Benih (PPB) di 6 wilayah eks Karesidenan yaitu PPB Wilayah Semarang di komplek Tarubudaya Ungaran, PPB Wilayah Pati di Kabupaten Pati, PPB Wilayah Surakarta di Kabupaten Sukoharjo, PPB Wilayah Pekalongan di Kabupaten Pemalang, PPB Wilayah Kedu di Kabupaten Magelang dan PPB Wilayah Banyumas di Kabupaten Banyumas.

No	Fasilitas Kantor	Jumlah (Luas/unit/set, dll)	Keterangan
1.	Kantor Induk BPSB	1	
2.	Laboratorium Pengujian Mutu Benih	1	
3.	PPB Wilayah Semarang	1	
4.	PPB Wilayah Pati	1	
5.	PPB Wilayah Surakarta	1	

6.	PPB Wilayah Pekalongan	1	
7.	PPB Wilayah Kedu	1	
8.	PPB Wilayah Banyumas	1	

c. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Semarang

BBTPH Wilayah Semarang terletak di kompleks Tarubudaya, dengan wilayah kerja meliputi 16 kebun benih yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota dengan komoditas dan luas lahan yang di usahakan berbeda-beda. Komoditas yang di usahakan antara lain padi, palawija dan hortikultura, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel . 2.4

Tabel. 2.4 Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah Semarang

No	Kebun Benih	Komoditas	Luas Total (ha)	Luas Produktif (ha)	Lokasi
1	KBP Banyubiru	Padi	6,00	5,00	Banyubiru, Banyubiru Kab
2	KBP Ketitang	Padi	8,20	7,0	Smg
3	KBP Wonoketingal	Padi	10,18	8,50	Ketitang, Godong, Grobogan
4	KBP Sendang Sikucing	Padi	20,00	18,50	Wonoketingal, Karanganyar, Demak
5	KBP Winong	Padi	8,3935	6,50	Sendang Sikucing, Rowosari, Kendal
6	KBP Sonobijo	Padi	6,6	6,0	Winong, Winong Pati
7	KBH Bandungan	Hortikultura	1,13	0,8	Jl. Blora-Randublatung Km2 Blora
8	KBH Karang Duren	Hortikultura	2,52	2,5	Kenteng, Ambarawa, Kab
9	KBH Kopeng	Hortikultura	0,9	0,6	Semarang
10	KBH Sumur Jurang	Hortikultura	3,44	1,5	Karang Duren, Tenganan, Semarang
11	KBH Karang Geneng	Hortikultura	12	12,0	Kopeng, Getasan, Kab Semarang
12	KBH Katonsari	Hortikultura	2,77	0,5	Sumur Jurang, Gn Pati, Kota Smg
13	KBH Bulu	Hortikultura	14,6	10,0	Karang Geneng, Gn

14	KBH Sidokerto	Hortikultura	9,7	7,08	Pati, Kota Smg
15	KBPal Rendole	Palawija	10,25	8,4	Katonsari, Demak
16	KBPal Kalinyamat	Padi dan Palawija	15,2	11,7	Kota, Demak Bulu, Bulu, Rembang Sidokerto, Pati, Pati Muktiharjo, Margorejo, Pati Margoyoso, Kalinyamatan, Jepara
Jumlah			131,884	106,59	

Sumber : Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang, 2023

d. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Surakarta

BBTPH Wilayah Surakarta terletak di Jl. Slamet Riyadi 386 Solo dengan wilayah kerja meliputi 16 kebun benih yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota. Komoditas dan luas lahan yang di usahakan antara lain padi, palawija dan hortikultura, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Luas Lahan Produktif dan Penggunaannya di Kebun Benih lingkup BBTPH Wilayah Surakarta

No	Kebun Benih	Komoditas	Luas (ha)	Lokasi
1	KBTPH. Tegalgondo	Padi	6,0	Sraten, Gatak, Sukoharjo
2	KBTPH. Banyudono	Padi	3,0	Kuwiran, Banyudono, Boyolali
3	KBTPH. Tohudan	Hortikultura	4,0	Tohudan, Colomadu, Karanganyar
4	KBTPH. Sonobijo	Padi	12,0	Klaruhan, Palur, Sukoharjo
5	KBTPH. Lawu I	Padi	8,0	Lawu, Nguter, Sukoharjo
6	KBTPH. Masaran	Padi	6,0	Masaran, Sragen
7	KBTPH Tawang- mangu	Hortikultura	2,0	Tawangmangu, Karanganyar
8	KBTPH. Tejomantri	Hortikultura	0,65	Wonorejo, Sukoharjo
9	KBTPH. Pendem	Hortikultura	16,0	Pendem, Mojogedang, Karanganyar
10	KBTPH. Sidoharjo	Palawija	4,0	Kayuloko, Sidoharjo, Wonogiri

11	KBTPH. Payaman	Hortikultura	3,0	Payaman, Magelang
12	KBTPH.. Salaman	Hortikultura	6,0	Menoreh, Salaman, Magelang
13	KBTPH. Sri Widodo	Padi	5,0	Prembun, Kebumen
14	KBTPH. Kaloran	Hortikultura	19,0	Kaloran, Temanggung
15	KBTPH. Sri Makarti	Padi	7,5	Kedu, Temanggung
16	KBH Kledung	Hortikultura	7,0	Kledung, Temanggung
Jumlah			109,15	

Sumber : Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta, 2023

e. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Banyumas

BBTPH Wilayah Banyumas terletak di Jl. Ahmad Yani 23 A, Purwokerto dengan wilayah kerja meliputi 11 kebun benih tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan rincian yakni :

Tabel 2.6 Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih B2TPH Wilayah Banyumas

No	Kebun Benih	Komoditas	Luas Lahan (ha)	Lokasi
1	KBTP Maos	Padi	11,58	Jl. Raya Maos No. 462, Cilacap
2	KBTP Petarukan	Padi	12,76	Jl. Raya Kebunsari Petarukan, Pemalang
3	KBTP Gamer	Padi	12,25	Jl. Patimura No. 1 Gamer, Pekalongan
4	KBTPH Kramat	Padi dan Bawang Merah	7,94	Jl. Raya Kramat, Tegal
5	KBTP Bojongsari	Padi	10,00	Jl. Bojongsari, Kembaran, Banyumas
6	KBTP Kalicacing	Palawija	10,11	Desa Kalimandi, Banjarnegara
7	KBTP Harjosari	Palawija	6,72	Jl. Raya Harjosari Kidul, Adiwerna, Tegal
8	KBH Karanganyar	Hortikultura	3,05	Jl. Raya Karanganyar, Kajen, Pekalongan
9	KBH Rowobelang	Hortikultura	47,80	Desa Rowobelang, Batang
10	KBTPH Kandeman	Palawija dan Hortikultura	70,83	Jl. Raya Kandeman Kabupaten Batang
11	KBH Baturaden	Hortikultura	0,35	Jl. Wisata No. 64 Baturraden, Banyumas
Jumlah			193,39	

Sumber : Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, 2023

f. Balai Benih Tanaman Perkebunan

Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan benih/bibit yang bermutu, Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui UPTD Balai benih Tanaman Perkebunan melakukan kegiatan perbenihan baik berupa pembibitan maupun kebun induk/entres komoditas perkebunan. Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai Kebun Dinas sebanyak 32 kebun.

Tabel 2.7. Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan

No	Kebun Dinas	Komoditas	Luas (Ha)	Lokasi
1	Adinuso	Teh, Cengkeh, kopi	8,10	Batang
2	Bantarangin	Tebu	9,60	Wonogiri
3	Binangun	Calon KI Kelapa Genjah	3,68	Purbalingga
4	Bulu	Randu,	20,02	Rembang
5	Bulukerto	Kakao, Kelapa	1,32	Wonogiri
6	Giriwarno	Kakao, Kelapa	2,24	Wonogiri
7	Gombong	Teh, Kopi Arabika	8,34	Pemalang
8	Jangglengan	Tebu	18,03	Sukoharjo
9	Jragan	Kopi	0,93	Temanggung
10	Kaliwiro	Calon KI Kelapa Kopyor, Kopi Tebu	9,46	Wonosobo
11	Kaliombo	Tebu, kakao, Kopi	21,00	Rembang
12	Karanganyar	Kopi, Lada, Kakao	6,00	Pekalongan
13	Karanggedong	Teh, Kopi	7,45	Temanggung
14	Karangreja	Kebun Induk Lada, Kelapa	8,39	Purbalingga
15	Limpakuwus	Kopi Robusta Kopi Robusta	10,89	Banyumas
16	Mento	Kopi Arabika	5,00	Temanggung
17	Ngagrang	Kebun Induk Vanili, Lada Cabe	4,00	Boyolali
18	Ngawen	Jawa Kelapa, Bibit Kopi	4,57	Salatiga
19	Noborejo	Kopi, Teh	4,00	Salatiga
20	Pagenteran	Kopi, Kelapa	2,00	Pemalang

No	Kebun Dinas	Komoditas	Luas (Ha)	Lokasi
21	Redin	Kopi	12,89	Purworejo
22	Sedayu	Kakao, Kelapa	2,40	Wonosobo
23	Selorejo	Kopi, Kakao, Kelapa	1,40	Wonogiri
24	Sidoharjo	Cengkeh, Teh	1,37	Wonogiri
25	Surjo	Teh	1,93	Batang
26	Surojoyo	Entres Kopi, Kebun Induk	6,30	Wonosobo
27	Tanggulrejo	Kakao, Kopi, Kelapa Teh	8,02	Magelang
28	Wanayasa	Tebu, Jambu Mete	5,87	Banjarnegara
29	Wuryantoro	Calon kebun induk kelapa, Tebu,	10,52	Wonogiri
30	Wonorejo	Kakao	156,40	Batang
31	Pirikan	Kakao	0,50	Magelang
32	Watuaji	Karet	2,50	Jepara
Jumlah			365,12	

Sumber : Balai Benih Tanaman Perkebunan, 2023

g. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BPTPHBun) berada di kompleks Tarubudaya Ungaran. Selain memiliki kantor di kompleks Tarubudaya, BPTPH juga memiliki Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) yang tersebar di 6 wilayah eks Karesidenan dan 1 Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Perkebunan yaitu :

1. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Semarang;
Kabupaten Semarang
2. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Pati.;
Kabupaten Pati
3. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Surakarta ;
Kabupaten Sukoharjo
4. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Pekalongan;
Kabupaten Pemalang

5. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Kedu ; Kabupaten Temanggung
6. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Banyumas di Banyumas. Kabupaten Banyumas
7. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Perkebunan Kota Salatiga

No	Fasilitas Kantor	Jumlah (Luas/unit/set, dll)	Keterangan/ Wilayah Kerja
1.	Kantor Induk BTPPH		
2.	LPHP Semarang	Luas Bangunan : 265 m ² Luas Lahan : 265 m ²	4 KABUPATEN, 2 KOTA dan 92 KECAMATAN : 1. KOTA SEMARANG (16 KECAMATAN) 2. KAB. SEMARANG (19 KECAMATAN) 3. DEMAK (14 KECAMATAN) 4. GROBOGAN (19 KECAMATAN) 5. KENDAL (20 KECAMATAN) 6. KOTA SALATIGA (4 KECAMATAN)
3.	LPHP Pati	Luas Bangunan : 629 m ² Luas Lahan : 903 m ²	5 KABUPATEN dan 76 KECAMATAN : 1. PATI (21 KECAMATAN) 2. KUDUS (9 KECAMATAN) 3. JEPARA (16 KECAMATAN) 4. BLORA (16 KECAMATAN) 5. REMBANG (14 KECAMATAN)

4.	LPHP Surakarta	Luas Bangunan : 779 m ² Luas Lahan : 4020 m ²	6 KABUPATEN, 1 KOTA dan 118 KECAMATAN : 1. WONOGIRI (21 KECAMATAN) 2. BOYOLALI (21 KECAMATAN) 3. SUKOHARJO (13 KECAMATAN) 4. SRAGEN (20 KECAMATAN) 5. KLATEN (26 KECAMATAN) 6. KARANGANYAR (16 KECAMATAN) 7. KOTA SURAKARTA (1 KECAMATAN)
5.	LPHP Pekalongan	Luas Bangunan : 437 m ² Luas Lahan : 978 m ² LUAS LAHAN PERCOBAAN : 19.116 m ²	5 KABUPATEN, 2 KOTA dan 91 KECAMATAN : 1. BREBES (17 KECAMATAN) 2. TEGAL (19 KECAMATAN) 3. KOTA TEGAL (3 KECAMATAN) 4. PEMALANG (14 KECAMATAN) 5. PEKALONGAN (19 KECAMATAN) 6. KOTA PEKALONGAN (4 KECAMATAN) 7. BATANG (15 KECAMATAN)
6.	LPHP Kedu	Luas Bangunan : 629 m ² Luas Lahan : 903 m ²	5 KABUPATEN, 1 KOTA dan 101 KECAMATAN : 1. KOTA MAGELANG (3 KECAMATAN) 2. MAGELANG (21 KECAMATAN) 3. WONOSOBO (15 KECAMATAN) 4. TEMANGGUNG (20 KECAMATAN) 5. PURWOREJO (16 KECAMATAN) 6. KEBUMEN (26 KECAMATAN)

7.	LPHP Banyumas	Luas Bangunan : 629 m ² Luas Lahan : 903 m ²	4 KABUPATEN dan 87 KECAMATAN : 1. CILACAP (24 KECAMATAN) 2. PURBALINGGA (18 KECAMATAN) 3. BANJARNEGARA (18 KECAMATAN) 4. BANYUMAS (27 KECAMATAN)
----	------------------	--	--

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Adanya isu strategis terkait dengan perubahan lingkungan strategis di era globalisasi dan digitalisasi, tuntutan masyarakat terhadap produk pertanian dan perkebunan semakin meningkat. Sementara disisi lain justru semakin kompleknya permasalahan yang dihadapi antara lain makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, serta pesatnya perubahan kemajuan teknologi dan informasi global. Capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2..1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra 2019-2023					Realisasi Capaian Tahun /Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun /Sampai Dengan Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan	%				1,05	1,10	1,12	1,12	1,15	0,29	1,10	1,10	1,12	1,12	76,28	100	98,21	100	97,39
B	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%				-	-	-	11,60	11,60	-	-	-	9,94	2,21	-	-	-	85,68	19,05
C	Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai	%				-	-	-	2,90	2,90	-	-	-	2,55	0,93	-	-	-	87,93	32,06
	Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe	%				-	-	-	10,80	10,80	-	-	-	10,80	2,66	-	-	-	100	24,62
	Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa	%				-	-	-	3,10	3,10	-	-	-	3,10	0,08	-	-	-	100	2,58

Data – Data terkait dengan kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Data Produksi

No	Komoditas	Satuan	target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	padi	Ton	11.543.015	11.629.588	11.716.810	11.804.86	11.893.221	9,655,654	9,489,165	9,618,657	9,536,242	11,893,221
2	Jagung	Ton	3.660.360	3.675.002	3.689.702	3.704.460	3.729.278	3,414,906	3,467,314	3,750,303	3,598,264	3,676,850
3	Kedelai	Ton	102.726	104.940	107.201	109.512	111.872	166,195	64,334	43,797	46,949	64,751
4	Bawang merah	Ton	528.537	550.276	572.016	593.756	615.495	445,586	481,890	611,165	564,255	497,155
5	Cabe merah	Ton	200.836	209.232	217.628	226.024	234.420	171,796	164,906	166,260	169,282	176,107
6	Tebu	Ton	2.934.025	2.948.695	2.963.438	2.978.255	2.993.147	2,880,763	2,894,884	2,394,941	2,603,736	2,615,775
7	Kopi	Ton	20.482	21.019	21.556	22.093	22.629	22,384	23,927	25,999	26,549	26,213
8	Kelapa	Ton	164.248.	165.069	165.895	166.924	167.558	172,190	168,717	174,041	170,688	170,061

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan pembangunan pertanian dan perkebunan adalah :

1. Pencapaian target produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Untuk dilakukan perbaikan sistem budidaya sehingga terjadi peningkatan produktivitas disamping itu juga dilakukan pemanfaatan tanam pada lahan-lahan yang belum optimal, pengendalian OPT, mitigasi dan antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI) serta perlindungan terhadap petani pada saat gagal panen.
2. Mengurangi Penggunaan pupuk an-organik dan pestisida yang berlebihan. Sosialisasi/penyuluhan penggunaan pupuk organik dan pestisida non kimia.
3. Perbaikan infrastruktur lahan dan air, perbenihan
Dengan perbaikan jaringan irigasi tersier, pada lahan perlu dilakukan upaya pembenah tanah dengan penggunaan pupuk organik secara bertahap. Untuk perbenihan dengan mendorong petani untuk menggunakan benih unggul bersertifikat.
4. Keterbatasan ketersediaan sumberdaya dan akses modal. Untuk mengoptimalkan sumberdaya lahan secara bertahap perlu dilakukan peningkatan indeks pertanaman khususnya padi, sedangkan akses permodalan dapat dilakukan melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan, stimulan subsidi suku bunga pinjaman usahatani dan pembiayaan lainnya.
5. Menumbuhkan minat tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan pemuda-pemuda yang ada di sentra usaha tani untuk mau berusaha tani di bidang pertanian yang nantinya akan menjadi petani milenial.

2.4.2. Peluang

1. Pasar komoditas pertanian dan perkebunan terbuka luas
Komoditas pertanian dan perkebunan tertentu yang mempunyai pangsa pasar dalam dan luar negeri terus untuk dipacu meningkatkan produksinya serta teknologi pengolahan dan pemasaran.
2. Peluang investasi dibidang agribisnis cukup besar

Di sektor hilir (pasca panen dan pemasaran) khususnya untuk beras dan aneka kacang umbi mempunyai peluang dikembangkan agar mempunyai nilai tambah. Hal ini sesuai dengan program pemerintah GRATIEKS (Gerakan Peningkatan Ekspor Pertanian).

3. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/kelompok tani dengan pengusaha/produsen.
Dengan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk Korporasi Petani dan Koperasi Pertanian serta kawasan pertanian.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2018-2023. Namun demikian, guna penyusunan perencanaan pembangunan pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan kedepannya maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan permasalahan mendasar yang menghambat capaian kinerja.

Beberapa persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan dimasa yang akan datang khususnya tahun 2024-2026, mencakup aspek: produksi, kesejahteraan petani, dan kelestarian sektor pertanian dan perkebunan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan internal yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah : 1). Masih terbatasnya jumlah ASN sesuai dengan kompetensi yang diperlukan; 2). Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan; dan 3). optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; Disamping faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga

berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, diantaranya adalah : 1). Kurangnya kesejahteraan petani ; 2). Lahan pertanian yang semakin berkurang

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 - 2026, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi ketahanan pangan yang berkelanjutan di Jawa Tengah
2. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani.
3. Kurang optimalnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

Tabel. 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	1. Belum optimalnya Ketersediaan Pangan / pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. - Rendahnya tingkat kesejahteraan petani 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi yang dimiliki oleh petani - Masih tingginya kehilangan hasil - Luas kepemilikan lahan sempit dan tersebar - Dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tumbuhan - Belum optimalnya penggunaan benih berserifikat. - Kurangnya nilai tambah bagi petani. - Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

a. Gambaran pelayanan perangkat daerah;

Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Matrik SWOT	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Potensi lahan dan iklim yang mendukung untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kandungan bahan organik pada lahan swah 2. Sempitnya luas kepemilikan lahan pertanian 3. Rendahnya ketersediaan prasarana (infrastruktur) sarana pertanian lainnya termasuk sarana produksi 4. Penguasaan Teknologi pertanian yang masih terbatas, sehingga

	<p>produktivitasnya menjadi rendah</p> <p>5. Ketersediaan benih sumber untuk sertifikasi masih terbatas</p> <p>6. Tingkat kehilangan dan kerusakan hasil produksi masih tinggi</p> <p>7. Penerapan Teknologi pasca Panen, pengolahan hasil dan pemasaran belum optimal</p> <p>8. Pertumbuhan produksi masih fluktuatif</p> <p>9. Pemilikan modal petani masih relative kecil</p> <p>10. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras.</p>
PELUANG	ANCAMAN
<p>1. Letak geografis yang strategis dengan pasar domestic provinsi lainnya dan pasar internasional</p> <p>2. Meningkatnya kebutuhan pangan seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk</p> <p>3. Meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pertanian yang bermutu, baik dalam maupun luar negeri</p> <p>4. Komitmen pemerintah dan apresiasi masyarakat dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan</p> <p>5. Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitian dan pengembangan usaha</p>	<p>1. Masih tingginya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian</p> <p>2. Berkurangnya minat tenaga kerja di sector pertanian</p> <p>3. Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim terhadap pertanaman</p> <p>4. Kemandirian petani yang masih rendah</p> <p>5. Berfluktuasi harga produk pertanian dan tingginya suku bunga usahatani</p> <p>6. Meningkatnya produk pangan impor dipasar domestik</p>

b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

Visi dari kementerian Pertanian yakni:

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Pertanian mempunyai 3 Misi yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

Untuk mencapai Visi-Misi tersebut Kementerian Pertanian memiliki tujuan yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan,
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian,

3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri,
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional,
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional,
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian,
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan,
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan,
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional,
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif efisien, dan berorientasi pada layanan prima,
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

c. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;

Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan penting dilakukan untuk mengoptimalkan potensi Jawa Tengah serta mensinkronkan kebijakan dan program pusat dan daerah. Hasil identifikasi kondisi terkini berupa isu strategis pertanian dan perkebunan sehingga untuk ditentukan Strategi Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Tahun 2024-2026.

d. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah;

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, maka potensi sub sektor pertanian dan perkebunan Jawa Tengah sesuai peruntukkannya meliputi kawasan budidaya dan kawasan konservasi.

Hasil telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagai berikut : Pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi Kawasan pertanian lahan basah seluas ± 990.652 Ha dan Kawasan pertanian lahan kering seluas ± 955.587 Ha yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program

perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang di Provinsi Jawa Tengah direncanakan seluas 1.022.570 Ha. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas ±620.635,62 ha, terdiri dari Perkebunan Rakyat (566.504,63 ha atau 91,28 %), Perkebunan Besar Negara/PTPN (39.143,93 ha atau 6,31 %), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS (14.687,06 ha atau 2,37 %).

Sub sektor perkebunan sampai dengan Tahun 2013, sudah menanganani lahan konservasi seluas 7.070 ha. Selain itu juga melaksanakan kegiatan Pengelolaan lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk seluas 1.365 ha, dengan penanaman bibit karet, kopi, kakao, kelapa, cengkeh dan mete.

No	Telaah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	RTRW 1. Berkurangnya lahan pertanian (LP2B) 2. Pengembangan Kawasan Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	1. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian dilokasi Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 2. Belum optimalnya pengembangan Kawasan sentra produksi pertanian karena rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang sempit	1. Perbedaan ketersediaan data luas lahan pertanian antara BPS, BPN dan Kementerian Pertanian 2. Industri hilir belum berkembang	1. UU Nomor 41 Tahun 2009 ttg Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditindaklanjuti Revisi Perda RTRW No. 16 Tahun 2019

e. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

bagi pelayanan perangkat daerah.

a. Pengelolaan lahan yang berlebihan

Agar pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan lebih banyak menggunakan sarana produksi yang ramah lingkungan.

b. Penggunaan pestisida, pupuk kimia dan alat pertanian dapat meningkatkan pencemaran. Menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida kimia sesuai anjuran melalui SLPHT, SLPTT dan memperbanyak penggunaan pupuk organik, agensia hayati dan pestisida nabati. Selain itu juga perlu digalakkan standarisasi pertanian, perkebunan dan pengelolaan pertanian perkebunan

organik secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh lembaga yang berkompeten.

- c. Pencemaran akibat hasil pengolahan produk pertanian perlu adanya fasilitasi pengolahan hasil limbah pertanian.

No	Telaah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	KLHS 1. Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan dan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian 2. Meningkatnya emisi gas rumah kaca sehingga mengakibatkan anomaly iklim	1. Rendahnya kandungan bahan organik pada lahan sawah, berkurangnya luas lahan pertanian 2. Perubahan pola tanam dan serangan OPT pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Petani tergantung pada pupuk anorganik 2. Rendahnya penggunaan pupuk/pestisida organik, masih banyak petani menggunakan benih yang penyebab emisi GRK (hibrida)	1. Permentan No. 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik (GAP-TP) 2. Permentan No. 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (GAP Buah dan Sayur) 3. Revisi Perda RTRW Nomor 16 Tahun 2019

Isu-isu strategis didapatkan berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal permasalahan pembangunan pertanian dan perkebunan yang dihadapi selama ini, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis dalam pembangunan pertanian dan perkebunan, yaitu:

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik
2. Belum optimalnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2024-2026, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

a. Tujuan

Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2024-2026 adalah:

1. Memantapkan produksi komoditas pertanian dan perkebunan sebagai wujud kontribusi ketahanan pangan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.
2. Meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

b. Sasaran

Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2024-2026 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan produksi Produksi Tanaman Pangan.
2. Terwujudnya peningkatan produksi Produksi Tanaman Hortikultura.
3. Terwujudnya peningkatan produksi Produksi Tanaman Perkebunan.
4. Terwujudnya peningkatan NTP Tanaman Pangan.
5. Terwujudnya peningkatan NTP Tanaman Hortikultura.
6. Terwujudnya peningkatan NTP Tanaman Perkebunan.
7. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.
8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
				2020	2021	2024	2025	2026	
Memantapkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud Kontribusi Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Jawa Tengah		Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	1,10	1,10	0,13	0,16	0,18	0,18
	Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura	Persentase peningkatan produksi bawang merah	%	4,44	3,80	2,5	2,5	2,5	2,5
		Persentase peningkatan produksi cabe	%	2,37	2	1,5	1,5	1,5	1,5
		Persentase peningkatan produksi durian	%	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5

		Persentase peningkatan produksi jahe	%	-	-	3	3	3	3
		Persentase peningkatan produksi melati	%	-	-	2	2	2	2
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Persentase peningkatan produksi jagung	%	0,30	0,29	0,2	0,2	0,2	0,2
		Persentase peningkatan produksi kedelai	%	1,20	2,75	0,2	0,2	0,2	0,2
		Persentase peningkatan produksi padi	%	0,54	0,52	0,2	0,2	0,2	0,2
	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase peningkatan produksi kelapa	%	0,30	0,44	0,009	0,009	0,009	0,009
		Persentase peningkatan produksi kopi	%	2,51	2,57	0,009	0,009	0,009	0,009
		Persentase peningkatan produksi tebu	%	0,30	0,49	0,009	0,009	0,009	0,009

Meningkatkan Kesejahteraan Petani		NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Angka	100,98	103,18	108,56	105,17	106,66	106,66
	Meningkatnya NTP Hortikultura	NTP Hortikultura	Angka	107,83	106,96	115,21	115,23	115,26	115,26
	Meningkatnya NTP Perkebunan	NTP Perkebunan Rakyat	Angka	88,47	95,46	103,34	103,36	103,39	103,39
	Meningkatnya NTP Tanaman Pangan	NTP Tanaman Pangan	Angka	105,34	102,10	105,22	105,24	105,27	105,27

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
				2020	2021	2024	2025	2026	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82,75	82,75	84	85	86	86
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,75	82,75	84	85	86	86
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	-	100	100	100	100

4.2 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 4.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya peningkatan	Persentase peningkatan produksi	Belum tercapainya produksi		Adanya faktor yang tidak	Ketersediaan komoditas tanaman			

produksi pertanian dan perkebunan	tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		mendukung keberhasilan pertanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (DPI, bencana, OPT, alih fungsi lahan, dan alih tanam komoditas lain)	pangan, hortikultura dan perkebunan kurang menyebabkan fluktuasi harga.			
		Kurang Aktifnya peran	12	Kurangnya personil Asuransi pelaksana AUTP di	Proses penyelesaian klaim dan	membuat surat pemberitahuan ke pihak Jasindo	Dinas Pertanian	1 tahun

		Jasindo dalam Pelaksanaan Pendaftaran peserta AOTP, Petugas lapang kurang respon untuk pendaftaran peserta AOTP, Proses klaim tidak sesuai dengan pedoman		Jawa Tengah	permasalahan lainnya sering terlambat dan tidak sesuai pedoman teknis			
--	--	---	--	-------------	---	--	--	--

		Kartu Tani tidak dapat digunakan untuk menebus pupuk subsidi	12	Kartu Tani gagal terinject alokasi pupuk subsidi, Kuota Kosong, Nomor Kartu mengalami perubahan tanpa konfirmasi user, Sinyal kurang bagus	Petani tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi	Sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan mengundang pihak BRI menjadi Narasumber	Bank BRI	1 tahun
		Sistem Aplikasi yang belum mampu menampung hasil inputan secara nasional di	12	Kurangnya kapasitas server membuat aplikasi menjadi lambat dan beberapa notifikasi gagal input yang harusnya muncul menjadi	Beberapa petani tidak masuk dalam e-Alokasi 2023	Menyusun jadwal penginputan masing-masing provinsi/kabupaten sehingga tidak terlalu membebani server kementerian pertanian	Kementerian Pertanian	1 bulan

		waktu yang bersamaan (kendala server)		tidak muncul				
		Kelebihan penyaluran pupuk subsidi oleh KPL	9	KPL Tidak berpedoman pada data detak e-Alokasi yang dicetak oleh admin e-Alokasi	Kelebihan salur akan menjadi temuan BPK dan memberikan kerugian pada produsen	Pembuatan form berisi data rekap penebusan menggunakan Kartu Tani + T Pubers sampai dengan bulan berjalan	Dinas Pertanian, Produsen Pupuk	1 tahun
		Benih tidak terjual dalam waktu yang lama (lebih dari 3 tahun)	9	permintaan pasar tidak sesuai dengan ketersediaan benih, kurangnya sosialisasi dan promosi	pencapaian PAD kurang optimal	meningkatkan promosi dan memperluas jejaring pasar	kepala balai, subkoordinator seksi, koordinator kebun	Tahun 2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah.

Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan sektor pertanian dan perkebunan adalah:

- Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usaha tani & modernisasi pertanian.
- Pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta DPI (Dampak Perubahan Iklim) yaitu melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan.
- Optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan optimalisasi sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat.
- Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian (optimalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier).
- Mendorong budidaya ramah lingkungan dan terintegrasi.
- Mendorong sertifikasi organik untuk komoditas pertanian.
- Meningkatkan efisiensi usaha pertanian tanaman pangan melalui analisis ekonomi usaha tani, pemantauan pasar, pengamatan susut hasil dan promosi pasar.
- Meningkatkan SDM pertanian yang berkualitas, terampil, profesional dan mandiri yang berjiwa entrepreneur.
- Mendorong petani milenial sebagai agen perubahan pertanian di daerah.
- Hilirisasi sektor pertanian yang mempunyai prospek ekspor (kopi, mocaf, porang, pengolahan buah-buahan, dll).
- Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin, serta kapasitas aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian.

Sebagai tindak lanjut dari 11 (sebelas) strategi maka ditetapkan arah kebijakan yang lebih bersifat operasional yang diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi selama ini. Arah kebijakan yang akan diambil dalam 3 (tiga) tahun kedepan adalah:

- Peningkatan produksi melalui peningkatan provitas dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- Pengamanan produksi melalui antisipasi sistem peramalan OPT dan mitigasi perubahan iklim.

- Penggunaan dan pengawasan peredaran benih bermutu bersertifikat.
- Pengamanan produksi melalui perbaikan sistem panen dan pasca panen.
- Penerapan SOP dalam setiap tahapan budidaya (GAP, GHP, GDP, GMP).
- Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- Penerapan pertanian organik menuju pertanian berkelanjutan.
- Perlindungan dan pemberdayaan petani.
- Hilirisasi berbasis korporasi dengan didukung SDM milenial.
- Mekanisasi Pertanian sebagai sarana efisiensi usaha tani.
- Peningkatan dukungan aparatur dinas melalui perbaikan manajemen.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan 1 Memantapkan produksi komoditas pertanian dan perkebunan sebagai wujud kontribusi ketahanan pangan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.</p>	<p>Sasaran 1.1 Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan</p>	<p>Strategi 1.1.1 Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usaha tani & modernisasi pertanian.</p> <p>Strategi 1.1.2 Pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta DPI (Dampak Perubahan Iklim) yaitu melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan.</p> <p>Strategi 1.1.3 Optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan optimalisasi sertifikasi</p>	<p>Arah Kebijakan 1.1.1.1 Peningkatan produksi melalui peningkatan provitas dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.</p> <p>Arah Kebijakan 1.1.2.1 Pengamanan produksi melalui antisipasi sistem peramalan OPT dan mitigasi perubahan iklim.</p> <p>Arah Kebijakan 1.1.3.1 Penggunaan dan pengawasan peredaran benih bermutu bersertifikat.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat.</p> <p>Strategi 1.1.4 Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian (optimalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier).</p>	<p>Arah Kebijakan 1.1.4.1 Pengamanan produksi melalui perbaikan sistem panen dan pasca panen.</p> <p>Arah Kebijakan 1.1.4.2 Penerapan SOP dalam setiap tahapan budidaya (GAP, GHP, GDP, GMP).</p> <p>Arah Kebijakan 1.1.4.3 Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Strategi 1.1.5 Hilirisasi sektor pertanian yang mempunyai prospek ekspor (kopi, mocaf, porang, pengolahan buah-buahan, dll).</p>	<p>Arah Kebijakan 1.1.5.1 Mekanisasi Pertanian sebagai sarana efisiensi usaha tani.</p>
	<p>Sasaran 1.2 Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan</p>	<p>Strategi 1.2.1 Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usaha tani & modernisasi pertanian.</p> <p>Strategi 1.2.2 Pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta DPI (Dampak Perubahan Iklim) yaitu melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan.</p> <p>Strategi 1.2.3 Optimalisasi kebun benih dinas sebagai</p>	<p>Arah Kebijakan 1.2.1.1 Peningkatan produksi melalui peningkatan provitas dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.</p> <p>Arah Kebijakan 1.2.2.1 Pengamanan produksi melalui antisipasi sistem peramalan OPT dan mitigasi perubahan iklim.</p> <p>Arah Kebijakan 1.2.3.1 Penggunaan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>penghasil benih bermutu bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan optimalisasi sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat.</p> <p>Strategi 1.2.4 Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian (optimalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier).</p>	<p>dan pengawasan peredaran benih bermutu bersertifikat.</p> <p>Arah Kebijakan 1.2.4.1 Pengamanan produksi melalui perbaikan sistem panen dan pasca panen.</p> <p>Arah Kebijakan 1.2.4.2 Penerapan SOP dalam setiap tahapan budidaya (GAP, GHP, GDP, GMP).</p> <p>Arah Kebijakan 1.2.4.3 Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Strategi 1.2.5 Hilirisasi sektor pertanian yang mempunyai prospek ekspor (kopi, mocaf, porang, pengolahan buah-buahan, dll).</p>	<p>meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.</p> <p>Arah Kebijakan 1.2.5.1 Mekanisasi Pertanian sebagai sarana efisiensi usaha tani.</p>
	<p>Sasaran 1.3 Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura</p>	<p>Strategi 1.3.1 Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usaha tani & modernisasi pertanian.</p> <p>Strategi 1.3.2 Pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta DPI (Dampak Perubahan Iklim) yaitu melakukan mitigasi akibat</p>	<p>Arah Kebijakan 1.3.1.1 Peningkatan produksi melalui peningkatan provitas dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.</p> <p>Arah Kebijakan 1.3.2.1 Pengamanan produksi melalui antisipasi sistem peramalan OPT dan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>bencana alam, banjir dan kekeringan.</p> <p>Strategi 1.3.3 Optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan optimalisasi sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat.</p> <p>Strategi 1.3.4 Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian (optimalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier).</p>	<p>mitigasi perubahan iklim.</p> <p>Arah Kebijakan 1.3.3.1 Penggunaan dan pengawasan peredaran benih bermutu bersertifikat.</p> <p>Arah Kebijakan 1.3.4.1 Pengamanan produksi melalui perbaikan sistem panen dan pasca panen.</p> <p>Arah Kebijakan 1.3.4.2 Penerapan SOP dalam setiap tahapan budidaya (GAP, GHP, GDP,</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Strategi 1.3.5 Hilirisasi sektor pertanian yang mempunyai prospek ekspor (kopi, mocaf, porang, pengolahan buah-buahan, dll).</p>	<p>GMP). Arah Kebijakan 1.3.4.3 Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Arah Kebijakan 1.3.5.1 Mekanisasi Pertanian sebagai sarana efisiensi usaha tani.</p>
<p>Tujuan 2 Meningkatkan kesejahteraan petani.</p>	<p>Sasaran 2.1 Meningkatnya NTP Tanaman Pangan</p>	<p>Strategi 2.1.1 Mendorong budidaya ramah lingkungan dan terintegrasi.</p>	<p>Arah Kebijakan 2.1.1.1 Penerapan pertanian organik menuju pertanian berkelanjutan.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Strategi 2.1.2 Meningkatkan efisiensi usaha pertanian tanaman pangan melalui analisis ekonomi usaha tani, pemantauan pasar, pengamatan susut hasil dan promosi pasar.</p> <p>Strategi 2.1.3 Mendorong petani milenial sebagai agen perubahan pertanian di daerah</p>	<p>Arah Kebijakan 2.1.2.1 Perlindungan dan pemberdayaan petani.</p> <p>Arah Kebijakan 2.1.3.1 Hilirisasi berbasis korporasi dengan didukung SDM milenial.</p>
	<p>Sasaran 2.2 Meningkatnya NTP Tanaman Hortikultura</p>	<p>Strategi 2.2.1 Mendorong budidaya ramah lingkungan dan terintegrasi.</p> <p>Strategi 2.2.2 Meningkatkan efisiensi usaha pertanian tanaman pangan melalui analisis ekonomi usaha tani,</p>	<p>Arah Kebijakan 2.2.1.1 Penerapan pertanian organik menuju pertanian berkelanjutan.</p> <p>Arah Kebijakan 2.2.2.1 Perlindungan dan pemberdayaan petani.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>pemantauan pasar, pengamatan susut hasil dan promosi pasar.</p> <p>Strategi 2.2.3 Mendorong petani milenial sebagai agen perubahan pertanian di daerah</p>	<p>Arah Kebijakan 2.2.3.1 Hilirisasi berbasis korporasi dengan didukung SDM milenial.</p>
	<p>Sasaran 2.3 Meningkatnya NTP Tanaman Perkebunan</p>	<p>Strategi 2.3.1 Mendorong budidaya ramah lingkungan dan terintegrasi.</p> <p>Strategi 2.3.2 Meningkatkan efisiensi usaha pertanian tanaman pangan melalui analisis ekonomi usaha tani, pemantauan pasar, pengamatan susut hasil dan promosi pasar.</p>	<p>Arah Kebijakan 2.3.1.1 Penerapan pertanian organik menuju pertanian berkelanjutan.</p> <p>Arah Kebijakan 2.3.2.1 Perlindungan dan pemberdayaan petani.</p> <p>Arah Kebijakan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Strategi 2.3.3 Mendorong petani milenial sebagai agen perubahan pertanian di daerah	2.3.3.1 Hilirisasi berbasis korporasi dengan didukung SDM milenial.
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	<p>Sasaran 3.1 Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah</p> <p>Sasaran 3.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah</p>	<p>Strategi 3.1.1 Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin, serta kapasitas aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian.</p> <p>Strategi 3.2.1 Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin, serta kapasitas aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian.</p>	<p>Arah Kebijakan 3.1.1.1 Peningkatan dukungan aparatur dinas melalui perbaikan manajemen.</p> <p>Arah Kebijakan 3.2.1.1 Peningkatan dukungan aparatur dinas melalui perbaikan manajemen.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan kedalam Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian sebagai wujud Kontribusi Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Jawa Tengah.

Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan pada satu urusan pilihan (pertanian).

6.1. Rencana Program

Dalam perkembangan periode tahun 2024-2026, upaya mewujudkan kedaulatan pangan sektor pertanian dan meningkatkan keajahteraan petani di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, program dimaksud adalah :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyuluhan Pertanian;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

6.2. Kegiatan

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan:
 - a. Penataan Prasarana Pertanian
 - 1). Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan:
 - a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - 1). Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian

- 2). Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
 - 1). Pengelolaan Peneribitan Setifikasi Benih
 - 2). Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
 - 3). Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
 - 4). Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
 - 1). Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
 - 1). Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
 - c. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - 1). Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
 - 2). Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
4. Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
 - 1). Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - 2). Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5. Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5). Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
 - 6). Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- b. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- d. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1). Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2). Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3). Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2). Pemeliharaan mebel
 - 3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6). Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 4). Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2). Pengadaan Mebel
 - 3). Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
 - 4). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 5). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2). Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3). Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2022)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
									2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah										118.024.406.000		112.100.591.000		118.019.342.000		348.144.339.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)		Angka	100		100		100		100		Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah *									116.674.406.000		111.583.006.000		116.669.342.000		344.926.754.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi		
						Indeks Kepuasan Masyarakat *	83	Angka	80	116.674.406.000	81	111.583.006.000	82	116.669.342.000	82	344.926.754.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							116.674.406.000		111.583.006.000		116.669.342.000		344.926.754.000		OPD Provinsi		

			DAERAH PROVINSI **															
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	100	%	100	633.000.000	100	633.000.000	100	633.000.000	100	1.899.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***						50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***		Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****		Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ***						168.000.000		168.000.000		168.000.000		504.000.000		OPD Provinsi
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai	100	%	100	168.000.000	100	168.000.000	100	168.000.000	100	504.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

					standar layanan ***													
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000			OPD Provinsi
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****		Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000			OPD Provinsi
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				-		-		-		-			OPD Provinsi
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****		Paket	1	-	1	-	1	-	3	-		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000			OPD Provinsi

					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****		Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0006				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****		Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0008				Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				35.000.000		35.000.000		35.000.000		105.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah ****		Laporan	0	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****		Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi

					lainnya yang disediakan ****													
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					290.000.000		290.000.000		290.000.000		870.000.000			OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***		Laporan	1	290.000.000	1	290.000.000	1	290.000.000	3	870.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000			OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****		Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					205.000.000		205.000.000		205.000.000		615.000.000			OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****		Laporan	1	205.000.000	1	205.000.000	1	205.000.000	3	615.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		OPD Provinsi

		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				80.000.000		80.000.000		80.000.000		240.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****		Laporan	0	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					125.000.000		125.000.000		125.000.000		375.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***		Unit	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	3	375.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		OPD Provinsi

					Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan ****		Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah mebel yang dipelihara ****		Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****		Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					-		-		-		-		OPD Prov insi
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****		Unit	9	-	3	-	3	-	15	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					-		-		-		-		OPD Prov insi

					Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah ****		Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					135.000.000		135.000.000		135.000.000		405.000.000		OPD Prov insi
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	100	%	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	405.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****		Paket	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****					-		-		-		-		OPD Prov insi

					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****		Paket	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0005				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****		Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0006				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****		Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0008				Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****		Laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		OPD Prov insi

					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****		Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					-		-		-		-		OPD Provinsi
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***		Unit	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel ****					-		-		-		-		OPD Provinsi
					Jumlah paket mebel yang disediakan ****		Paket	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					-		-		-		-		OPD Provinsi
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****		Unit	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01.1. 07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				-		-			-				OPD Prov insi		
					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****		Unit	1	-		1	-		1	-		3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				345.000.000		345.000.000			345.000.000			1.035.000.000		OPD Prov insi	
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***		Laporan	1	345.000.000		1	345.000.000		1	345.000.000		3	1.035.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				5.000.000		5.000.000			5.000.000			15.000.000		OPD Prov insi	
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****		Laporan	1	5.000.000		1	5.000.000		1	5.000.000		3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				200.000.000		200.000.000			200.000.000			600.000.000		OPD Prov insi	

					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.08.0003				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****											OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.08.0004				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****			140.000.000		140.000.000		140.000.000		420.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	3	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***			225.000.000		225.000.000		225.000.000		675.000.000		OPD Prov insi

					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***		Unit	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	3	675.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****		Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel ****				10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah mebel yang dipelihara ****		Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****		Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi

		X.XX.01.1. 09.0009			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		225.000.0 00		OPD Prov insi
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi ****		Unit	1	75.000.00 0	1	75.000.00 0	1	75.000.00 0	3	225.000.0 00	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 09.0010			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		150.000.0 00		OPD Prov insi
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi ****		Unit	1	50.000.00 0	1	50.000.00 0	1	50.000.00 0	3	150.000.0 00	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi

		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****		Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					117.200.000		117.200.000		117.200.000		351.600.000		OPD Provinsi
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	100	%	100	117.200.000	100	117.200.000	100	117.200.000	100	351.600.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****		Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				40.800.000		40.800.000		40.800.000		122.400.000		OPD Provinsi
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Paket	1	40.800.000	1	40.800.000	1	40.800.000	3	122.400.000		OPD Provinsi

		X.XX.01.1. 06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****					-		-		-				OPD Prov insi
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****		Paket	0	-	0	-	0	-	0	-			OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ****					10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0		30.000.00 0		OPD Prov insi
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****		Paket	1	10.000.00 0	1	10.000.00 0	1	10.000.00 0	3	30.000.00 0			OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****													OPD Prov insi
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****		Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-			OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu ****					10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0		30.000.00 0		OPD Prov insi
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****		Laporan	1	10.000.00 0	1	10.000.00 0	1	10.000.00 0	3	30.000.00 0			OPD Prov insi

		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				46.400.000		46.400.000		46.400.000		139.200.000		OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****		Laporan	1	46.400.000	1	46.400.000	1	46.400.000	3	139.200.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					-		-		-		-		OPD Provinsi
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***		Unit	8	-	0	-	0	-	8	-		SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel ****				-		-		-		-		OPD Provinsi
					Jumlah paket mebel yang disediakan ****		Paket	0	-	0	-	0	-	0	-		SUB BAGIAN TATA USAHA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					344.600.000		334.600.000		334.600.000		1.013.800.000		OPD Provinsi

					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***		Laporan	1	344.600.000	1	334.600.000	1	334.600.000	3	1.013.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****		Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					135.200.000		135.200.000		135.200.000		405.600.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****		Laporan	1	135.200.000	1	135.200.000	1	135.200.000	3	405.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					10.000.000		-		-		10.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Laporan	1	10.000.000	1	-	1	-	3	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi

		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				194.400.000		194.400.000		194.400.000		583.200.000		OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****		Laporan	1	194.400.000	1	194.400.000	1	194.400.000	3	583.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					189.000.000		189.000.000		189.000.000		567.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***		Unit	1	189.000.000	10	189.000.000	10	189.000.000	21	567.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				114.000.000		114.000.000		114.000.000		342.000.000		OPD Provinsi

					Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah ****		Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					185.000.000		185.000.000		185.000.000		555.000.000		OPD Prov insi
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	100	%	100	185.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000	100	555.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****		Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****					-		-		-		-		OPD Prov insi

					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****		Paket	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0005				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****		Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0006				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****												OPD Prov insi
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****		Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0008				Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				35.000.000		35.000.000		35.000.000		105.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****		Laporan	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000		OPD Prov insi

					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****		Laporan	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	3	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					-		-		-		-		OPD Provinsi
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***		Unit	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel ****					-		-		-		-		OPD Provinsi
					Jumlah paket mebel yang disediakan ****		Paket	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					-		-		-		-		OPD Provinsi
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****		Unit	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				-		-			-			OPD Provinsi
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					404.400.000		290.000.000		404.400.000		1.098.800.000		OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	1	404.400.000	1	290.000.000	1	404.400.000	3	1.098.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					200.000.000		200.000.000		200.000.000		600.000.000		OPD Provinsi

					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****		Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				-		-		-		-		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Laporan	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				194.400.000		80.000.000		194.400.000		468.800.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****		Laporan	1	194.400.000	1	80.000.000	1	194.400.000	3	468.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					110.000.000		110.000.000		110.000.000		330.000.000		OPD Prov insi

					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***		Unit	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	3	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****		Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel ****				-		-		-		-		OPD Prov insi
					Jumlah mebel yang dipelihara ****		Unit	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****		Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi

		X.XX.01.1. 09.0009			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****													OPD Prov insi	
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi ****		Unit	1	-	1	-	1	-	3	-		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 09.0010			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****														OPD Prov insi
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi ****		Unit	1	-	1	-	1	-	3	-		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	100	%	100	682.500.0 00	100	635.500.0 00	100	682.500.0 00	100	2.000.500. 000		Balai Benih Tanaman Perkebuna n Kelas A	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 03		Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***															OPD Prov insi
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***		Dokume n	1	42.000.00 0	1	-	1	42.000.00 0	3	84.000.00 0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi

		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				42.000.000	-			42.000.000	84.000.000		OPD Provinsi	
					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****		Dokumen	1	42.000.000	1	-	1	42.000.000	3	84.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					145.500.000	145.500.000			145.500.000	436.500.000		OPD Provinsi	
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	100	%	100	145.500.000	100	145.500.000	100	145.500.000	100	436.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					10.000.000	10.000.000			10.000.000	30.000.000		OPD Provinsi	
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****		Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					35.000.000	35.000.000			35.000.000	105.000.000		OPD Provinsi	
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01.1. 06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****												OPD Prov insi	
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****		Paket	1	-	1	-	1	-	3	-		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ****				7.500.000		7.500.000		7.500.000		22.500.00 0		OPD Prov insi	
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****		Paket	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	3	22.500.00 0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi	
		X.XX.01.1. 06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan ****				3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000		OPD Prov insi	
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan ****		Dokume n	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi	
		X.XX.01.1. 06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu ****												OPD Prov insi	
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****		Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi	

		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				90.000.000		90.000.000		90.000.000		270.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****		Laporan	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	3	270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					-		-		-		-		OPD Provinsi
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***		Unit	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				-		-		-		-		OPD Provinsi
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****		Unit	5	-	5	-	5	-	15	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				-		-		-		-		OPD Provinsi

					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****		Unit	7	-	1	-	1	-	9	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					352.500.000		352.500.000		352.500.000		1.057.500.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***		Laporan	1	352.500.000	1	352.500.000	1	352.500.000	3	1.057.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					7.500.000		7.500.000		7.500.000		22.500.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****		Laporan	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	3	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					160.000.000		160.000.000		160.000.000		480.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		Laporan	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	3	480.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi

		X.XX.01.1. 08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					30.000.00 0		30.000.00 0		30.000.00 0		90.000.00 0		OPD Prov insi	
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Laporan	0	30.000.00 0	0	30.000.00 0	0	30.000.00 0	0	90.000.00 0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					155.000.0 00		155.000.0 00		155.000.0 00		465.000.0 00		OPD Prov insi	
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****		Laporan	1	155.000.0 00	1	155.000.0 00	1	155.000.0 00	3	465.000.0 00		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						142.500.0 00		137.500.0 00		142.500.0 00		422.500.0 00		OPD Prov insi	
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang		Unit	1	142.500.0 00	1	137.500.0 00	1	142.500.0 00	3	422.500.0 00		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi

					dilakukan pemeliharaan ***												
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****		Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel ****				15.000.000		10.000.000		15.000.000		40.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah mebel yang dipelihara ****		Unit	1	15.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****		Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					47.500.000		47.500.000		47.500.000		142.500.000		OPD Provinsi
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****		Unit	8		47.500.000	1	47.500.000	1	47.500.000	10	142.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	100	%	100		651.000.000	100	651.000.000	100	651.000.000	100	1.953.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***						3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***		Dokume n	1		3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****						3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****		Dokume n	1		3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administra si Umum Perangkat Daerah ***						143.000.000		143.000.000		143.000.000		429.000.000		OPD Provinsi

					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	100	%	100	143.000.000	100	143.000.000	100	143.000.000	100	429.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****		Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****												OPD Prov insi
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****		Paket	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		OPD Prov insi

					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****		Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0006				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****		Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0008				Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****		Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****		Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					320.000.000		320.000.000		320.000.000		960.000.000		OPD Prov insi

				Daerah ***														
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***		Laporan	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	960.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****		Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					180.000.000		180.000.000		180.000.000		540.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****		Laporan	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	3	540.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****													OPD Provinsi
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan		Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

					perlengkapan kantor yang disediakan ****													
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					135.000.000		135.000.000		135.000.000		405.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****		Laporan	1	135.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	3	405.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						185.000.000		185.000.000		185.000.000		555.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***		Unit	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	555.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		OPD Provinsi

						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****		Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000			OPD Provinsi
						Jumlah mebel yang dipelihara ****		Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000			OPD Provinsi
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****		Unit	0	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	210.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					-		-		-		-			OPD Provinsi
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****		Unit	1	-	1	-	1	-	3	-		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****		Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	100	%	100	111.872.706.000	100	106.987.706.000	100	111.877.642.000	100	330.738.054.000	SEKRETA RIAT	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.02		Administra si Keuangan Perangkat Daerah ***					102.917.706.000		102.917.706.000		102.917.706.000		308.753.18.000		OPD Prov insi
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***		Dokume n	4	102.917.706.000	4	102.917.706.000	4	102.917.706.000	12	308.753.18.000	SUB BAGIAN KEUANGA N	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****					99.000.000.000		99.000.000.000		99.000.000.000		297.000.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****		Orang	618	99.000.000.000	618	99.000.000.000	618	99.000.000.000	618	297.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGA N	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****					3.917.706.000		3.917.706.000		3.917.706.000		11.753.118.000		OPD Prov insi

					Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****		Dokumen	12	3.917.706.000	12	3.917.706.000	12	3.917.706.000	36	11.753.118.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***					300.000.000		10.000.000		300.000.000		610.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***		Dokumen	1	300.000.000	1	10.000.000	1	300.000.000	3	610.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ****					50.000.000		10.000.000		50.000.000		110.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah ****		Dokumen	2	50.000.000	2	10.000.000	2	50.000.000	6	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****					200.000.000		-		200.000.000		400.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****		Dokumen	2	200.000.000	2	-	2	200.000.000	6	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ****					50.000.000	-			50.000.000		100.000.000		OPD Prov insi	
					Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah ****		Laporan	2	50.000.000	2	-		2	50.000.000	6	100.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***						85.000.000	25.000.000			85.000.000		195.000.000		OPD Prov insi	
					Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***		100 %	100	85.000.000	100	25.000.000		100	85.000.000	100	195.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ****					-	-			-		-			OPD Prov insi
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan ****		Paket	0	-	0	-		0	-	0	-		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****					50.000.000	10.000.000			50.000.000		110.000.000			OPD Prov insi
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang		Orang	50	50.000.000	50	10.000.000		50	50.000.000	150	110.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA	OPD Prov insi

						mengikuti pendidikan dan pelatihan ****											WAIAN		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ****					35.000.000		15.000.000		35.000.000		85.000.000		OPD Prov insi	
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan ****		Orang	40	35.000.000	40	15.000.000	40	35.000.000	120	85.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.06		Administra si Umum Perangkat Daerah ***						1.725.000.000		845.000.000		1.729.936.000		4.299.936.000		OPD Prov insi	
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***		100 %	100	1.725.000.000	100	845.000.000	100	1.729.936.000	100	4.299.936.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					75.000.000		50.000.000		75.000.000		200.000.000		OPD Prov insi	
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****		Paket	1	75.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	3	200.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					100.000.000		25.000.000		100.000.000		225.000.000		OPD Prov insi	

					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Paket	2	100.000.000	2	25.000.000	2	100.000.000	6	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0003				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				75.000.000		-		75.000.000		150.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****		Paket	5	75.000.000	2	-	5	75.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0005				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				75.000.000		20.000.000		79.936.000		174.936.000		OPD Provinsi
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****		Paket	5	75.000.000	2	20.000.000	5	79.936.000	12	174.936.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0006				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				50.000.000		-		50.000.000		100.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****		Dokumen	1	50.000.000	1	-	1	50.000.000	3	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0008				Fasilitas Kunjungan Tamu ****				100.000.000		-		100.000.000		200.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah laporan fasilitas		Laporan	1	100.000.000	1	-	1	100.000.000	3	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM	OPD Provinsi

						kunjungan tamu ****											DAN KEPEGA WAIAN	
		X.XX.01.1. 06.0009			Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				1.250.000. 000		750.000.0 00		1.250.000. 000		3.250.000. 000			OPD Prov insi
						Jumlah laporan penyelnggar aan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	20	1.250.000. 000	20	750.000.0 00	20	1.250.000. 000	60	3.250.000. 000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 07		Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah ***					1.750.000. 000		-		1.750.000. 000		3.500.000. 000			OPD Prov insi
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	13	1.750.000. 000	13	-	13	1.750.000. 000	39	3.500.000. 000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				1.050.000. 000		-		1.050.000. 000		2.100.000. 000			OPD Prov insi
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	3	1.050.000. 000	3	-	3	1.050.000. 000	9	2.100.000. 000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Prov insi

					yang disediakan ****														
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel ****				100.000.000		-		100.000.000		200.000.000			OPD Prov insi	
					Jumlah paket mebel yang disediakan ****		Paket	10	100.000.000	15	-		20	100.000.000	45	200.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				100.000.000		-		100.000.000		200.000.000			OPD Prov insi	
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****		Unit	10	100.000.000	10	-		10	100.000.000	30	200.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				250.000.000		-		250.000.000		500.000.000			OPD Prov insi	
					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****		Unit	5	250.000.000	5	-		5	250.000.000	15	500.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				250.000.000		-		250.000.000		500.000.000			OPD Prov insi	

					Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****		Unit	5	250.000.000	5	-	5	250.000.000	15	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					1.975.000.000		1.850.000.000		1.975.000.000		5.800.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***		Laporan	1	1.975.000.000	1	1.850.000.000	1	1.975.000.000	3	5.800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					25.000.000		-		25.000.000		50.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****		Laporan	5	25.000.000	5	-	5	25.000.000	15	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					950.000.000		950.000.000		950.000.000		2.850.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Laporan	12	950.000.000	12	950.000.000	12	950.000.000	36	2.850.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Prov insi

					yang disediakan ****														
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				100.000.000	-			100.000.000		200.000.000			OPD Provinsi	
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Laporan	2	100.000.000	2	-		2	100.000.000	6	200.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				900.000.000		900.000.000		900.000.000		2.700.000.000			OPD Provinsi	
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****		Laporan	12	900.000.000	12	900.000.000		12	900.000.000	36	2.700.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					3.120.000.000		1.340.000.000			3.120.000.000		7.580.000.000			OPD Provinsi
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang		Unit	25	3.120.000.000	25	1.340.000.000		25	3.120.000.000	75	7.580.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

					dilakukan pemeliharaan ***												
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				1.000.000.000		772.585.000		1.000.000.000		2.772.585.000		OPD Prov insi
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****		Unit	17	1.000.000.000	10	772.585.000	17	1.000.000.000	44	2.772.585.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel ****				470.000.000		-		470.000.000		940.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah mebel yang dipelihara ****		Unit	20	470.000.000	20	-	20	470.000.000	60	940.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				150.000.000		-		150.000.000		300.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****		Unit	20	150.000.000	20	-	20	150.000.000	60	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Prov insi

		X.XX.01.1. 09.0009			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				500.000.0 00	-			500.000.0 00	1.000.000. 000		OPD Prov insi	
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi ****		Unit	2	500.000.0 00	2	-	2	500.000.0 00	6	1.000.000. 000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 09.0010			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				500.000.0 00	67.415.00 0			500.000.0 00	1.067.415. 000		OPD Prov insi	
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi ****		Unit	5	500.000.0 00	5	67.415.00 0	5	500.000.0 00	15	1.067.415. 000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 09.0011			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				500.000.0 00	500.000.0 00			500.000.0 00	1.500.000. 000		OPD Prov insi	
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi ****		Unit	5	500.000.0 00	5	500.000.0 00	5	500.000.0 00	15	1.500.000. 000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Prov insi

						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **		100	%	100	700.000.000	100	665.000.000	100	700.000.000	100	2.065.000.000	Balai Perindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***							20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***			Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****			Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ****															OPD Provinsi
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah ****			Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administra si Umum Perangkat Daerah ***							110.000.000		105.000.000		105.000.000		320.000.000		OPD Provinsi

					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	100	%	100	110.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	320.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****		Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				-		-		-		-		OPD Prov insi
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****		Paket	1	-	1	-	1	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		OPD Prov insi

				Urusan Pemerintah Daerah ***															
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***		Unit	0	-	0	-	0	-	0	-		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel ****														OPD Provinsi
						Jumlah paket mebel yang disediakan ****		Paket	0	-	0	-	0	-	0	-		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****														OPD Provinsi
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****		Unit	0	-	0	-	0	-	0	-		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****														OPD Provinsi
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****		Unit	0	-	0	-	0	-	0	-		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					410.000.000		410.000.000		440.000.000		1.260.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***		Laporan	1	410.000.000	1	410.000.000	1	440.000.000	3	1.260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****		Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					225.000.000		225.000.000		225.000.000		675.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****		Laporan	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	3	675.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					-		-		30.000.000		30.000.000		OPD Provinsi

					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****		Laporan	0	-	0	-	0	30.000.000	0	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					175.000.000		175.000.000		175.000.000		525.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****		Laporan	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	3	525.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
	X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***						160.000.000		130.000.000		135.000.000		425.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***		Unit	1	160.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	3	425.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi

		X.XX.01.1. 09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				40.000.00 0		40.000.00 0		40.000.00 0		120.000.0 00		OPD Prov insi
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****		Unit	1	40.000.00 0	1	40.000.00 0	1	40.000.00 0	3	120.000.0 00	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 09.0005			Pemeliharaan Mebel ****				10.000.00 0		10.000.00 0		15.000.00 0		35.000.00 0		OPD Prov insi
					Jumlah mebel yang dipelihara ****		Unit	1	10.000.00 0	1	10.000.00 0	1	15.000.00 0	3	35.000.00 0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				50.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0		90.000.00 0		OPD Prov insi
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****		Unit	1	50.000.00 0	1	20.000.00 0	1	20.000.00 0	3	90.000.00 0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi
		X.XX.01.1. 09.0009			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****												OPD Prov insi
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire		Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Prov insi

						habilitasi ****												
		X.XX.01.1.09.0010				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****			60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000			OPD Provinsi
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah *								1.350.000.000		517.585.000		1.350.000.000		3.217.585.000		Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
						Indeks Manajemen Risiko *	Angka	100	1.350.000.000	100	517.585.000	100	1.350.000.000	100	3.217.585.000		Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **						1.350.000.000		517.585.000		1.350.000.000		3.217.585.000			OPD Provinsi
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	%	100	1.350.000.000	100	517.585.000	100	1.350.000.000	100	3.217.585.000		SEKRETARIAT	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***						1.350.000.000		517.585.000		1.350.000.000		3.217.585.000		OPD Provinsi
					Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***	100	%	100		1.350.000.000	100	517.585.000	100	1.350.000.000	100	3.217.585.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****						750.000.000		317.585.000		750.000.000		1.817.585.000		OPD Provinsi
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****		Dokumen	10		750.000.000	10	317.585.000	10	750.000.000	30	1.817.585.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****						600.000.000		200.000.000		600.000.000		1.400.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ****		Laporan	21		600.000.000	21	200.000.000	21	600.000.000	63	1.400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Meningkatkan Kesejahteraan Petani										700.000.000		700.000.000		700.000.000		2.100.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
					NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura		Angka	108,56			105,17		106,66		106,66		Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi

						dan perkebunan											
	Meningkatnya NTP Hortikultura *								250.000.000		250.000.000		250.000.000		750.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
						NTP Hortikultura *	Angka	108,11	250.000.000	108,49	250.000.000	108,95	250.000.000	108,95	750.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN **						250.000.000		250.000.000		250.000.000		750.000.000		OPD Provinsi
						Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura **	%	1,5	250.000.000	1,5	250.000.000	1,5	250.000.000	1,5	750.000.000		OPD Provinsi
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ***					250.000.000		250.000.000		250.000.000		750.000.000		OPD Provinsi
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen ***	Kelompok	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	15	750.000.000		OPD Provinsi

		3.27.02.1.0 1.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****					250.000.0 00		250.000.0 00		250.000.0 00		750.000.0 00		OPD Prov insi
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen ****		Kelomp ok	5	250.000.0 00	5	250.000.0 00	5	250.000.0 00	15	750.000.0 00		OPD Prov insi
	Meningk atnya NTP Perkebu nan *									200.000.0 00		200.000.0 00		200.000.0 00		600.000.0 00	Dinas Pertanian dan Perkebun an	OPD Prov insi
						NTP Perkebunan Rakyat *		Angka	100,59	200.000.0 00	100, 97	200.000.0 00	101, 35	200.000.0 00	101, 35	600.000.0 00	Dinas Pertanian dan Perkebuna n	OPD Prov insi
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAA N DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN **							200.000.0 00		200.000.0 00		200.000.0 00		600.000.0 00		OPD Prov insi
						Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan **		%	1,5	200.000.0 00	1,5	200.000.0 00	1,5	200.000.0 00	1,5	600.000.0 00		OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1		Pengawas an Peredaran Sarana Pertanian ***						200.000.0 00		200.000.0 00		200.000.0 00		600.000.0 00		OPD Prov insi

						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen ***		Kelompok	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000		OPD Provinsi
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****					200.000.000		200.000.000		200.000.000		600.000.000		OPD Provinsi
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen ****		Kelompok	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000		OPD Provinsi
	Meningkatnya NTP Tanaman Pangan *									250.000.000		250.000.000		250.000.000		750.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
						NTP Tanaman Pangan *		Angka	105,19	250.000.000	105,57	250.000.000	105,95	250.000.000	105,95	750.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi

		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN **						250.000.0 00		250.000.0 00		250.000.0 00		750.000.0 00		OPD Prov insi	
						Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan **		%	1,5	250.000.0 00	1,5	250.000.0 00	1,5	250.000.0 00	1,5	750.000.0 00		OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1		Pengawas an Peredaran Sarana Pertanian ***						250.000.0 00		250.000.0 00		250.000.0 00		750.000.0 00		OPD Prov insi
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen ***		Kelomp ok	3	250.000.0 00	3	250.000.0 00	3	250.000.0 00	9	750.000.0 00		OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****					250.000.0 00		250.000.0 00		250.000.0 00		750.000.0 00		OPD Prov insi
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan		Kelomp ok	3	250.000.0 00	3	250.000.0 00	3	250.000.0 00	9	750.000.0 00		OPD Prov insi

						pasca panen ****												
Memantapkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud Kontribusi Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Jawa Tengah										92.548.286.000	72.919.691.000	93.958.286.000	259.426.263.000		Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi		
						Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		%	0,58		0,16		0,13		0,13		Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
	Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura *									2.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	7.000.000.000		Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi		
						Persentase peningkatan produksi bawang		%	2,5	659.650.000	2,5	371.138.000	2,5	742.275.000	2,5	1.773.063.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi

						merah *											n	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN **						659.650.0 00		371.138.0 00		742.275.0 00		1.773.063. 000			OPD Prov insi
						Produksi bawang merah **		Ton	51500 0	659.650.0 00	5278 75	371.138.0 00	5410 72	742.275.0 00	1583 947	1.773.063. 000	Bidang Hortikultur a	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1		Pengawas an Peredaran Sarana Pertanian ***					659.650.0 00		371.138.0 00		742.275.0 00		1.773.063. 000			OPD Prov insi
						Jumlah Luas Panen Bawang Merah ***		Ha	51500	659.650.0 00	5277 6	371.138.0 00	5409 5	742.275.0 00	1583 71	1.773.063. 000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****					659.650.0 00		371.138.0 00		742.275.0 00		1.773.063. 000			OPD Prov insi
						Jumlah Luas Tanam Bawang Merah ****		Ha	15	659.650.0 00	8	371.138.0 00	25	742.275.0 00	48	1.773.063. 000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	OPD Prov insi
						Persentase peningkatan produksi cabe *		%	1,5	613.450.0 00	1,5	371.138.0 00	1,5	742.275.0 00	1,5	1.726.863. 000	Dinas Pertanian dan Perkebuna n	OPD Prov insi
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN **						613.450.0 00		371.138.0 00		742.275.0 00		1.726.863. 000			OPD Prov insi

						Produksi cabai **		Ton	34100 0	613.450.0 00	3461 15	371.138.0 00	3513 07	742.275.0 00	1038 422	1.726.863. 000	Bidang Hortikultur a	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1		Pengawas an Peredaran Sarana Pertanian ***						613.450.0 00		371.138.0 00		742.275.0 00		1.726.863. 000		OPD Prov insi
						Jumlah Luas Panen Cabai ***		Ha	43718	613.450.0 00	4436 4	371.138.0 00	4502 9	742.275.0 00	1331 11	1.726.863. 000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****						613.450.0 00		371.138.0 00		742.275.0 00		1.726.863. 000		OPD Prov insi
						Jumlah Luas Tanam Cabai ****		Ha	25	613.450.0 00	20	371.138.0 00	35	742.275.0 00	80	1.726.863. 000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	OPD Prov insi
						Persentase peningkatan produksi durian *		%	2,5	613.450.0 00	2,5	366.342.0 00	2,5	773.175.0 00	2,5	1.752.967. 000	Dinas Pertanian dan Perkebuna n	OPD Prov insi
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAA N DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN **							613.450.0 00		366.342.0 00		773.175.0 00		1.752.967. 000		OPD Prov insi
						Produksi durian **		Ton	14966 8	613.450.0 00	1534 10	366.342.0 00	1572 45	773.175.0 00	4603 23	1.752.967. 000	Bidang Hortikultur a	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1		Pengawas an Peredaran Sarana Pertanian ***						613.450.0 00		366.342.0 00		773.175.0 00		1.752.967. 000		OPD Prov insi
						Jumlah Luas Panen Alpukat ***		Ha	13773	245.380.0 00	1397 9	163.905.0 00	1418 9	327.810.0 00	4194 1	737.095.0 00	SEKSI TANAMAN BUAH	OPD Prov insi

		3.27.02.1.0 1.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****				245.380.0 00		163.905.0 00		327.810.0 00		737.095.0 00		OPD Prov insi	
						Jumlah Luas Tanam Alpukat ****		Ha	20	245.380.0 00	10	163.905.0 00	30	327.810.0 00	60	737.095.0 00	SEKSI TANAMAN BUAH	OPD Prov insi
						Jumlah Luas Panen Durian ***		Ha	11973	368.070.0 00	1227 3	202.437.0 00	1258 0	445.365.0 00	3682 6	1.015.872. 000	SEKSI TANAMAN BUAH	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****					368.070.0 00		202.437.0 00		445.365.0 00		1.015.872. 000		OPD Prov insi
						Jumlah Luas Tanam Durian ****		Ha	20	368.070.0 00	10	202.437.0 00	30	445.365.0 00	60	1.015.872. 000	SEKSI TANAMAN BUAH	OPD Prov insi
						Persentase peningkatan produksi jahe *		%	3	490.760.0 00	3	296.909.0 00	3	593.820.0 00	3	1.381.489. 000	Dinas Pertanian dan Perkebuna n	OPD Prov insi
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN **							490.760.0 00		296.909.0 00		593.820.0 00		1.381.489. 000		OPD Prov insi
						Produksi jahe **		Ton	34862	490.760.0 00	3590 8	296.909.0 00	3698 5	593.820.0 00	1077 55	1.381.489. 000	Bidang Hortikultur a	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1		Pengawas an Peredaran Sarana Pertanian ***						490.760.0 00		296.909.0 00		593.820.0 00		1.381.489. 000		OPD Prov insi
						Jumlah Luas Panen Jahe ***		Ha	1599	490.760.0 00	1647	296.909.0 00	1697	593.820.0 00	4943	1.381.489. 000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN	OPD Prov insi

																	TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.0 1.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****				490.760.000		296.909.000		593.820.000		1.381.489.000			OPD Provinsi
					Jumlah Luas Tanam Jahe ****		Ha	5	368.070.000	4	202.437.000	10	445.365.000	19	1.015.872.000		SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	OPD Provinsi
					Jumlah Luas Tanam Kencur ****		Ha	3	122.690.000	2	94.472.000	10	148.455.000	15	365.617.000		SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	OPD Provinsi
					Persentase peningkatan produksi melati *		%	2	122.690.000	2	94.473.000	2	148.455.000	2	365.618.000		Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN **						122.690.000		94.473.000		148.455.000		365.618.000			OPD Provinsi
					Produksi melati **		Ton	24627	122.690.000	25120	94.473.000	25622	148.455.000	75369	365.618.000		Bidang Hortikultura	OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 1		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ***					122.690.000		94.473.000		148.455.000		365.618.000			OPD Provinsi
					Jumlah Luas Panen Melati ***		Ha	1,099	122.690.000	1,121	94.473.000	1,144	148.455.000	3,364	365.618.000		SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	OPD Provinsi

		3.27.02.1.0 1.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****					122.690.0 00		94.473.00 0		148.455.0 00		365.618.0 00		OPD Prov insi
						Jumlah Luas Tanam Melati ****	Ha	4	122.690.0 00	3	94.473.00 0	8	148.455.0 00	15	365.618.0 00	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	OPD Prov insi	
	Meningk atnya Produks i Tanama n Pangan *								66.355.78 6.000		50.755.19 1.000		67.055.78 6.000		184.166.7 63.000	Dinas Pertanian dan Perkebun an	OPD Prov insi	
						Persentase peningkatan produksi jagung *	%	0,2	850.000.0 00	0,2	500.000.0 00	0,2	1.000.000. 000	0,2	2.350.000. 000	Dinas Pertanian dan Perkebuna n	OPD Prov insi	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAA N DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN **						850.000.0 00		500.000.0 00		1.000.000. 000		2.350.000. 000		OPD Prov insi	
						Produksi jagung **	Ton	35765 77	850.000.0 00	3583 730	500.000.0 00	3590 898	1.000.000. 000	1,1E +07	2.350.000. 000	Bidang Tanaman Pangan	OPD Prov insi	
		3.27.02.1.0 1		Pengawas an Peredaran Sarana Pertanian ***					850.000.0 00		500.000.0 00		1.000.000. 000		2.350.000. 000		OPD Prov insi	
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (jagung) ***	Ha	58338 5	850.000.0 00	5845 52	500.000.0 00	5857 21	1.000.000. 000	1753 658	2.350.000. 000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	OPD Prov insi	

		3.27.02.1.0 1.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****				850.000.0 00		500.000.0 00		1.000.000. 000		2.350.000. 000		OPD Prov insi	
						Capaian luas tanam bantuan benih Jagung dan Serealia Lainnya ****		Ha	800	850.000.0 00	500	500.000.0 00	1000	1.000.000. 000	2300	2.350.000. 000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	OPD Prov insi
						Persentase peningkatan produksi kedelai *		%	0,2	650.000.0 00	0,2	400.000.0 00	0,2	800.000.0 00	0,2	1.850.000. 000	Dinas Pertanian dan Perkebuna n	OPD Prov insi
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN **							650.000.0 00		400.000.0 00		800.000.0 00		1.850.000. 000		OPD Prov insi
						Produksi kedelai **		Ton	52657	650.000.0 00	5276 2	400.000.0 00	5286 8	800.000.0 00	1582 87	1.850.000. 000	Bidang Tanaman Pangan	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1		Pengawas an Peredaran Sarana Pertanian ***						650.000.0 00		400.000.0 00		800.000.0 00		1.850.000. 000		OPD Prov insi
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (kedelai) ***		Ha	31241	650.000.0 00	3130 3	400.000.0 00	3136 6	800.000.0 00	9391 0	1.850.000. 000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****					650.000.0 00		400.000.0 00		800.000.0 00		1.850.000. 000		OPD Prov insi

						Capaian luas tanam bantuan benih kedelai ****		Ha	400	650.000.000	300	400.000.000	500	800.000.000	1200	1.850.000.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi padi *		%	0,2	64.855.786.000	0,2	49.855.191.000	0,2	65.255.786.000	0,2	179.966.763.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN **							40.724.075.000		28.628.288.000		40.949.075.000		110.301.438.000		OPD Provinsi
						Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan **		%	3	13.829.580.000	3	12.750.000.000	3	13.704.580.000	3	40.284.160.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	OPD Provinsi
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ***						13.829.580.000		12.750.000.000		13.704.580.000		40.284.160.000		OPD Provinsi
						Jumlah kelembagaan pengelola alsintan ***		Unit	1096	13.829.580.000	1133	12.750.000.000	1173	13.704.580.000	3402	40.284.160.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	OPD Provinsi
		3.27.02.1.01.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****						13.829.580.000		12.750.000.000		13.704.580.000		40.284.160.000		OPD Provinsi
						Jumlah kelompok tani yang difasilitasi alsintan ****		Kelompok	100	13.829.580.000	90	12.750.000.000	120	13.704.580.000	310	40.284.160.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	OPD Provinsi

					Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya **		%	2	7.450.200.000	2	6.725.200.000	2	7.450.200.000	2	21.625.600.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	OPD Provinsi
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ***					7.450.200.000		6.725.200.000		7.450.200.000		21.625.600.000		OPD Provinsi
					Jumlah informasi harga pasar yang disebarluaskan ***		Komoditi	6	300.000.000	6	250.000.000	6	300.000.000	18	850.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	OPD Provinsi
		3.27.02.1.01.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****					300.000.000		250.000.000		300.000.000		850.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah kab/kota yang dipublikasikan informasi harga pasar ****		Kabupaten/Kota	35	300.000.000	35	250.000.000	35	300.000.000	35	850.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	OPD Provinsi
					Jumlah kelompok pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya ***		Kelompok	105	3.810.600.000	105	3.335.600.000	105	3.810.600.000	315	10.956.800.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	OPD Provinsi

		3.27.02.1.0 1.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****				3.810.600. 000		3.335.600. 000		3.810.600. 000		10.956.80 0.000		OPD Prov insi
					Angka persentase susut hasil padi ****		%	10,15	110.000.0 00	10,1 5	100.000.0 00	10,1 5	110.000.0 00	10,1 5	320.000.0 00	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLA HAN DAN MUTU	OPD Prov insi
					Jumlah alat pasca panen perkebunan/ta naman pangan/hortik ultura ****		Unit	105	3.700.600. 000	105	3.235.600. 000	105	3.700.600. 000	315	10.636.80 0.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLA HAN DAN MUTU	OPD Prov insi
					Jumlah kelompok pengolah hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya ***		Kelomp ok	35	3.339.600. 000	35	3.139.600. 000	35	3.339.600. 000	105	9.818.800. 000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLA HAN DAN MUTU	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****				3.339.600. 000		3.139.600. 000		3.339.600. 000		9.818.800. 000		OPD Prov insi
					Jumlah alat pengolah hasil perkebunan/ta naman pangan/hortik ultura ****		Paket	35	3.339.600. 000	35	3.139.600. 000	35	3.339.600. 000	105	9.818.800. 000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLA HAN DAN MUTU	OPD Prov insi

								%	85	4.617.000.000	85	1.667.000.000	85	4.667.000.000	85	10.951.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	OPD Provinsi
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ***						4.617.000.000		1.667.000.000		4.667.000.000		10.951.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah produksi benih Buah ***		Batang	30000		1.050.000.000	15000	500.000.000	25000	1.100.000.000	70000	2.650.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Provinsi
		3.27.02.1.02.0005		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****						1.050.000.000		500.000.000		1.100.000.000		2.650.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah Produksi benih Tanaman Buah ****		Batang	30000		1.050.000.000	15000	500.000.000	25000	1.100.000.000	70000	2.650.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Provinsi
					Jumlah produksi benih Kedelai ***		Ton	4		95.000.000	1,6	45.000.000	3,2	95.000.000	8,8	235.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
		3.27.02.1.02.0005		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****						95.000.000		45.000.000		95.000.000		235.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah Produksi benih Palawija ****		Ton	4		95.000.000	1,6	45.000.000	3,2	95.000.000	8,8	235.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi

					Jumlah produksi benih Kentang ***		Ton	20	650.000.000	8	250.000.000	16	650.000.000	44	1.550.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****				650.000.000		250.000.000		650.000.000		1.550.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah Produksi benih Sayur ****		Ton	20	650.000.000	8	250.000.000	16	650.000.000	44	1.550.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Provinsi
					Jumlah produksi benih Padi ***		Ton	210	2.522.000.000	49	722.000.000	192,5	2.522.000.000	451,5	5.766.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****				2.522.000.000		722.000.000		2.522.000.000		5.766.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah Produksi benih Padi ****		Ton	210	2.522.000.000	49	722.000.000	192,5	2.522.000.000	451,5	5.766.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
					Jumlah produksi benih Planlet ***		Batang	33000	300.000.000	17000	150.000.000	30000	300.000.000	80000	750.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****				300.000.000		150.000.000		300.000.000		750.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah Produksi Planlet benih ****		Batang	33000	300.000.000	17000	150.000.000	30000	300.000.000	80000	750.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Provinsi

					Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas **		%	85	4.549.000.000	85	1.649.000.000	85	4.599.000.000	85	10.797.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	OPD Provinsi
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ***					4.549.000.000		1.649.000.000		4.599.000.000		10.797.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah pengembangan tanaman hias ***		Batang	700	200.000.000	525	150.000.000	700	200.000.000	1925	550.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Provinsi
		3.27.02.1.02.0005		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****					200.000.000		150.000.000		200.000.000		550.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah pengembangan Tanaman Hias ****		Batang	700	200.000.000	525	150.000.000	700	200.000.000	1925	550.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Provinsi
					Jumlah produksi benih bawang merah ***		Ton	4,25	200.000.000	4,25	105.000.000	4,25	200.000.000	12,75	505.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Provinsi
		3.27.02.1.02.0005		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****					200.000.000		105.000.000		200.000.000		505.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah luas Perbanyakan Benih Bawang Merah ****		Ha	1	200.000.000	1	105.000.000	1	200.000.000	3	505.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Provinsi

					Jumlah produksi benih padi ***		Ton	139,83	2.150.000.000	77,35	600.000.000	232,05	2.200.000.000	449,23	4.950.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****				2.150.000.000		600.000.000		2.200.000.000		4.950.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah luas Perbanyak Benih Padi ****		Ha	47	2.150.000.000	26	600.000.000	78	2.200.000.000	151	4.950.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	OPD Prov insi
					Jumlah produksi benih palawija ***		Ton	5,44	350.000.000	5,44	190.000.000	5,44	350.000.000	16,32	890.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****				350.000.000		190.000.000		350.000.000		890.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah luas Perbanyak Benih Palawija ****		Ha	8	350.000.000	8	190.000.000	8	350.000.000	24	890.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	OPD Prov insi
					Jumlah Produksi benih tanaman buah ***		Batang	3750	1.649.000.000	1000	604.000.000	3750	1.649.000.000	8500	3.902.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****				1.649.000.000		604.000.000		1.649.000.000		3.902.000.000		OPD Prov insi
					Jumlah perbanyak benih		Batang	3750	1.649.000.000	1000	604.000.000	3750	1.649.000.000	8500	3.902.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Prov insi

						Tanaman Buah ****											LTURA	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang **	%	85	4.520.600.000	85	1.685.000.000	85	4.570.600.000	85	10.776.200.000		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	OPD Provinsi
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ***					4.520.600.000		1.685.000.000		4.570.600.000		10.776.200.000			OPD Provinsi
						Jumlah perbanyakan benih tanaman buah ***	Batang	4000	675.000.000	2000	393.000.000	4000	655.000.000	10000	1.723.000.000		SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Provinsi
		3.27.02.1.02.0005		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****					675.000.000		393.000.000		655.000.000		1.723.000.000			OPD Provinsi
						Jumlah perbanyakan benih tanaman buah ****	Batang	4000	675.000.000	2000	393.000.000	4000	655.000.000	10000	1.723.000.000		SEKSI BENIH HORTIKULTURA	OPD Provinsi
						Jumlah produksi benih padi ***	Ton	315	3.390.600.000	35	1.007.000.000	315	3.300.600.000	665	7.698.200.000		SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
		3.27.02.1.02.0005		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan					3.390.600.000		1.007.000.000		3.300.600.000		7.698.200.000			OPD Provinsi

		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****					50.000.00 0		50.000.00 0		90.000.00 0		190.000.0 00		OPD Prov insi
						Luas pengembangan sayuran ****		Ha	1	50.000.00 0	1	50.000.00 0	1	90.000.00 0	3	190.000.0 00	SEKSI BENIH HORTIKU LTURA	OPD Prov insi
						Jumlah produksi tanaman hias ***		Batang	2500	25.000.00 0	2250	25.000.00 0	2000	25.000.00 0	6750	75.000.00 0	SEKSI BENIH HORTIKU LTURA	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****					25.000.00 0		25.000.00 0		25.000.00 0		75.000.00 0		OPD Prov insi
						Jumlah pengembangan tanaman hias ****		Batang	2500	25.000.00 0	2250	25.000.00 0	2000	25.000.00 0	6750	75.000.00 0	SEKSI BENIH HORTIKU LTURA	OPD Prov insi
						Persentase layanan sertifikasi benih **		%	100	2.334.195. 000	100	1.319.200. 000	100	2.334.195. 000	100	5.987.590. 000		OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 2		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ***						2.334.195. 000		1.319.200. 000		2.334.195. 000		5.987.590. 000		OPD Prov insi
						Pengawasan peredaran benih perkebunan ***		Bulan	12	201.400.0 00	12	121.700.0 00	12	201.400.0 00	36	524.500.0 00		OPD Prov insi

		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****				201.400.000		121.700.000		201.400.000		524.500.000		OPD Prov insi
					Terpantaunya mutu benih tanaman perkebunan yang beredar ****		Bulan	12	201.400.000	12	121.700.000	12	201.400.000	36	524.500.000		OPD Prov insi
					Pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan ***		Bulan	12	360.900.000	12	93.100.000	12	360.900.000	36	814.900.000		OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****				360.900.000		93.100.000		360.900.000		814.900.000		OPD Prov insi
					Terpantaunya mutu benih tanaman pangan yang beredar ****		Bulan	12	360.900.000	12	93.100.000	12	360.900.000	36	814.900.000		OPD Prov insi
					Pengujian laboratorium hortikultura ***		Lembar	118	125.300.000	122	150.400.000	125	125.300.000	365	401.000.000		OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 2.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih ****				125.300.000		150.400.000		125.300.000		401.000.000		OPD Prov insi
					Terbitnya sertifikat benih tanaman hortikultura ****		Lembar	1045	125.300.000	1075	150.400.000	1109	125.300.000	3229	401.000.000		OPD Prov insi
					Pengujian laboratorium tanaman		Lembar	1,045	109.200.000	1,075	65.500.000	1109	109.200.000	1111,12	283.900.000		OPD Prov insi

						pangan ***												
		3.27.02.1.0 2.0001				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih ****			109.200.0 00		65.500.00 0		109.200.0 00		283.900.0 00			OPD Prov insi
						Terbitnya sertifikat benih tanaman pangan ****	Lembar	118	109.200.0 00	122	65.500.00 0	125	109.200.0 00	365	283.900.0 00			OPD Prov insi
						Sertifikasi benih hortikultura buah ***	Batang	49350 0	177.000.0 00	5181 75	40.500.00 0	5440 80	177.000.0 00	1555 755	394.500.0 00			OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 2.0005				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****			177.000.0 00		40.500.00 0		177.000.0 00		394.500.0 00			OPD Prov insi
						Tersedianya benih hortikultura tanaman buah bersertifikat ****	Batang	49350 0	177.000.0 00	5181 75	40.500.00 0	5440 80	177.000.0 00	1555 755	394.500.0 00			OPD Prov insi
						Sertifikasi benih hortikultura sayuran ***	Ha	105	200.100.0 00	110	169.400.0 00	115	200.100.0 00	330	569.600.0 00			OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 2.0005				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****			200.100.0 00		169.400.0 00		200.100.0 00		569.600.0 00			OPD Prov insi
						Terpantaunya mutu benih tanaman hortikultura yang beredar ****	Bulan	12	82.700.00 0	12	78.500.00 0	12	82.700.00 0	36	243.900.0 00			OPD Prov insi

					Tersedianya benih hortikultura tanaman sayuran ****		Ton	1260	117.400.000	1320	90.900.000	1380	117.400.000	3960	325.700.000		OPD Provinsi
					Sertifikasi benih padi ***		Ha	5,43	868.695.000	5454	488.700.000	5481	868.695.000	10940,4	2.226.090.000		OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****				868.695.000		488.700.000		868.695.000		2.226.090.000		OPD Provinsi
					Tersedianya benih padi bersertifikat ****		Ton	21720	868.695.000	21816	488.700.000	21924	868.695.000	65460	2.226.090.000		OPD Provinsi
					Sertifikasi benih palawija ***		Ha	1105	183.100.000	1111	99.700.000	1116	183.100.000	3332	465.900.000		OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****				183.100.000		99.700.000		183.100.000		465.900.000		OPD Provinsi
					Tersedianya benih palawija bersertifikat ****		Ton	1657,5	183.100.000	1666,5	99.700.000	1674	183.100.000	4998	465.900.000		OPD Provinsi
					Sertifikasi benih tanaman perkebunan ***		Batang	824000	108.500.000	848720	90.200.000	874180	108.500.000	2546900	307.200.000		OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****				108.500.000		90.200.000		108.500.000		307.200.000		OPD Provinsi

					Tersedianya benih tanaman perkebunan ****		Batang	82400 0	108.500.0 00	8487 20	90.200.0 0	8741 80	108.500.0 00	2546 900	307.200.0 00		OPD Prov insi
					Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan **		%	100	135.000.0 00	100	170.000.0 00	100	135.000.0 00	100	440.000.0 00	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ***					135.000.0 00		170.000.0 00		135.000.0 00		440.000.0 00		OPD Prov insi
					jumlah LKMA yang mendapatkan fasilitas pembiayaan ***		Unit	20	135.000.0 00	20	170.000.0 00	20	135.000.0 00	60	440.000.0 00	SEKSI PUPUK DAN PEMBIY AAN	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****					135.000.0 00		170.000.0 00		135.000.0 00		440.000.0 00		OPD Prov insi
					Jumlah LKMA yang difasilitasi kegiatan pembiayaan ****		Orang	20	135.000.0 00	20	170.000.0 00	20	135.000.0 00	60	440.000.0 00	SEKSI PUPUK DAN PEMBIY AAN	OPD Prov insi
					Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani **		%	2,5	967.000.0 00	2,5	701.388.0 00	2,5	967.000.0 00	2,5	2.635.388. 000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	OPD Prov insi

		3.27.02.1.0 1		Pengawas an Peredaran Sarana Pertanian ***					967.000.0 00		701.388.0 00		967.000.0 00		2.635.388. 000		OPD Prov insi	
						luas lahan yang mendapatkan jaminan keberlangsun gan usaha tani ***		Ha	15750	967.000.0 00	1655 0	701.388.0 00	1737 5	967.000.0 00	4967 5	2.635.388. 000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAY AAN	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****					967.000.0 00		701.388.0 00		967.000.0 00		2.635.388. 000		OPD Prov insi	
						Luas lahan yang difasilitasi kegiatan asuransi ****		Ha	15750	967.000.0 00	1655 0	701.388.0 00	1737 5	967.000.0 00	4967 5	2.635.388. 000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAY AAN	OPD Prov insi
						Persentase luas lahan yang dioptimasi **		%	2,5	1.061.500. 000	2,5	1.061.500. 000	2,5	1.061.500. 000	2,5	3.184.500. 000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1		Pengawas an Peredaran Sarana Pertanian ***					1.061.500. 000		1.061.500. 000		1.061.500. 000		3.184.500. 000		OPD Prov insi	
						jumlah luasan lahan yang dioptimasi ***		Ha	200	1.061.500. 000	200	1.061.500. 000	200	1.061.500. 000	600	3.184.500. 000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****					1.061.500. 000		1.061.500. 000		1.061.500. 000		3.184.500. 000		OPD Prov insi	

						jumlah benih mendukung optimasi lahan ****		Kg	5000	530.750.000	5000	530.750.000	5000	530.750.000	15000	1.592.250.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi
						jumlah pupuk organik mendukung optimasi lahan ****		Ton	200	530.750.000	200	530.750.000	200	530.750.000	600	1.592.250.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi
								%	90	260.000.000	93	300.000.000	92	260.000.000	92	820.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	OPD Provinsi
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ***		Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi **				260.000.000		300.000.000		260.000.000		820.000.000		OPD Provinsi
						jumlah kab/kota yang menyalurkan pupuk sesuai alokasi ***		Kabupaten/Kota	35	260.000.000	35	300.000.000	35	260.000.000	35	820.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	OPD Provinsi
		3.27.02.1.01.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****						260.000.000		300.000.000		260.000.000		820.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi distribusi pupuk ****		Orang	350	260.000.000	350	300.000.000	350	260.000.000	1050	820.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	OPD Provinsi
						Produksi padi **		Ton	9594280	1.000.000.000	9613469	600.000.000	9632696	1.200.000.000	2,9E+07	2.800.000.000	Bidang Tanaman Pangan	OPD Provinsi
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ***						1.000.000.000		600.000.000		1.200.000.000		2.800.000.000		OPD Provinsi

						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (padi) ***		Ha	16861 65	1.000.000. 000	1689 538	600.000.0 00	1692 917	1.200.000. 000	5068 620	2.800.000. 000	SEKSI PADI	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1.0001				Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****				1.000.000. 000		600.000.0 00		1.200.000. 000		2.800.000. 000		OPD Prov insi
						Capaian luas tanam bantuan benih Padi ****		Ha	2800	1.000.000. 000	1500	600.000.0 00	3200	1.200.000. 000	7500	2.800.000. 000	SEKSI PADI	OPD Prov insi
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN **							5.901.920. 000		6.017.112. 000		5.901.920. 000		17.820.95 2.000		OPD Prov insi
						Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik **		m	74202 74	5.901.920. 000	7420 274	6.017.112. 000	7420 274	5.901.920. 000	2,2E +07	17.820.95 2.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	OPD Prov insi
		3.27.03.1.0 1		Penataan Prasarana Pertanian ***						5.901.920. 000		6.017.112. 000		5.901.920. 000		17.820.95 2.000		OPD Prov insi
						Persentase Jaringan irigasi alternatif ***		%	5	4.750.000. 000	5	4.750.000. 000	5	4.750.000. 000	5	14.250.00 0.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Prov insi
		3.27.03.1.0 1.0001				Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian ****				4.750.000. 000		4.750.000. 000		4.750.000. 000		14.250.00 0.000		OPD Prov insi
						Jaringan Irigasi Alternatif yang difasilitasi (unit) ****		Unit	100	4.750.000. 000	100	4.750.000. 000	100	4.750.000. 000	300	14.250.00 0.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Prov insi

						Persentase jaringan irigasi tersier yang baik ***		%	1,88	1.151.920.000	1,88	1.267.112.000	1,88	1.151.920.000	1,88	3.570.952.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi
		3.27.03.1.0 1.0001			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian ****					1.151.920.000		1.267.112.000		1.151.920.000		3.570.952.000		OPD Provinsi
						jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi (m) ****		m	15000	1.151.920.000	15000	1.267.112.000	15000	1.151.920.000	45000	3.570.952.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN **							6.074.991.000		5.349.991.000		6.074.991.000		17.499.973.000		OPD Provinsi
						Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam **		%	5	125.000.000	10	85.000.000	15	125.000.000	15	335.000.000	Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	OPD Provinsi
		3.27.05.1.0 1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi ***						125.000.000		85.000.000		125.000.000		335.000.000		OPD Provinsi
						Luasan lahan yang terdampak Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang bisa ditangani ***		%	5	125.000.000	10	85.000.000	15	125.000.000	15	335.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi

		3.27.05.1.0 1.0002			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan ****					125.000.000		85.000.000		125.000.000		335.000.000		OPD Provinsi
					Luasan lahan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang tertangani ****		Ha	300	125.000.000	250	85.000.000	300	125.000.000	850	335.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi	
					Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) **		%	15	5.949.991.000	15	5.264.991.000	20	5.949.991.000	20	17.164.973.000	Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	OPD Provinsi	
		3.27.05.1.0 1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi ***					5.949.991.000		5.264.991.000		5.949.991.000		17.164.973.000		OPD Provinsi	
					Luasan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap luas pengembangan tanaman ***		%	15	5.949.991.000	15	5.264.991.000	20	5.949.991.000	20	17.164.973.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi	
		3.27.05.1.0 1.0001			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan				5.949.991.000		5.264.991.000		5.949.991.000		17.164.973.000		OPD Provinsi	

					Perkebunan ****												
						Jumlah Agens Pengendali Hayati (APH) yang diproduksi dan digunakan untuk pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ****	Liter	16750	335.000.000	12500	250.000.000	16750	335.000.000	46000	920.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabe) ****	Ha	150	400.000.000	90	250.000.000	150	400.000.000	390	1.050.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman pangan (padi, jagung kedelai) ****	Ha	650	400.000.000	600	250.000.000	650	400.000.000	1900	1.050.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman perkebunan (tebu, kelapa, kopi) ****	Ha	50	4.814.991.000	30	4.514.991.000	50	4.814.991.000	130	14.144.973.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN **						12.154.800.000		9.859.800.000		12.329.800.000		34.344.400.000		OPD Provinsi

						Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya **		%	2,5	6.174.800.000	2,5	6.074.800.000	2,5	6.349.800.000	2,5	18.599.400.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	OPD Provinsi
		3.27.07.1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ***						200.000.000		200.000.000		200.000.000		600.000.000		OPD Provinsi
						Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya ***		%	2,5	200.000.000	2,5	200.000.000	2,5	200.000.000	2,5	600.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
		3.27.07.1.01.0004		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian ****						200.000.000		200.000.000		200.000.000		600.000.000		OPD Provinsi
						Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya ****		Orang	237	200.000.000	237	200.000.000	237	200.000.000	711	600.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
		3.27.07.1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian ***						5.774.800.000		5.674.800.000		5.774.800.000		17.224.400.000		OPD Provinsi
						Persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan		%	0,2	5.774.800.000	0,2	5.674.800.000	0,2	5.774.800.000	0,2	17.224.400.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi

		3.27.07.1.0 2.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani ****					5.774.800. 000		5.674.800. 000		5.774.800. 000		17.224.40 0.000		OPD Prov insi	
						Jumlah kelompok tani yang difasilitasi promosi pemasaran ****		Kelomp ok	60	1.414.100. 000	60	1.364.100. 000	60	1.414.100. 000	180	4.192.300. 000		SEKSI PENYULU HAN DAN PELATIHA N	OPD Prov insi
						Jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaa n ****		Kelomp ok	127	4.360.700. 000	127	4.310.700. 000	127	4.360.700. 000	381	13.032.10 0.000		SEKSI PENYULU HAN DAN PELATIHA N	OPD Prov insi
		3.27.07.1.0 3		Pengemb angan Kapasitas Kelembag aan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan ***						200.000.0 00		200.000.0 00		375.000.0 00		775.000.0 00		OPD Prov insi	
						Persentase peningkatan jumlah penumbuhan dan pengembang an korporasi ***		%	60	200.000.0 00	60	200.000.0 00	60	375.000.0 00	60	775.000.0 00		SEKSI BINA USAHA	OPD Prov insi
		3.27.07.1.0 3.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani ****					200.000.0 00		200.000.0 00		375.000.0 00		775.000.0 00		OPD Prov insi	

					Jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi ****		Unit	2	200.000.000	2	200.000.000	2	375.000.000	6	775.000.000	SEKSI BINA USAHA	OPD Provinsi
					Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih **		%	100	5.980.000.000	100	3.785.000.000	100	5.980.000.000	100	15.745.000.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN	OPD Provinsi
		3.27.07.1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian ***					5.980.000.000		3.785.000.000		5.980.000.000		15.745.000.000		OPD Provinsi
					Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian ***		Orang	5130	5.980.000.000	5250	3.785.000.000	5370	5.980.000.000	15750	15.745.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi
		3.27.07.1.02.0001		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian ****					3.250.000.000		2.250.000.000		3.250.000.000		8.750.000.000		OPD Provinsi
					Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM pertanian ****		Orang	4317	3.250.000.000	3476	2.250.000.000	4289	3.250.000.000	12082	8.750.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi
		3.27.07.1.02.0002		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani ****					2.730.000.000		1.535.000.000		2.730.000.000		6.995.000.000		OPD Provinsi
					Optimalisasi capaian sasaran teknis SDM pertanian ****		Orang	2150	2.730.000.000	1200	1.535.000.000	1397	2.730.000.000	4747	6.995.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi

						Produksi tanaman rempah dan penyegar ****		Kg	50600	679.398.000	12283	180.000.000	46297	739.635.000	109180	1.599.033.000	SEKSI PRODUKSI I	OPD Provinsi
						Produksi tanaman rempah dan penyegar ****		Kg	65300	297.091.000	32479	160.000.000	62841	340.000.000	160620	797.091.000	SEKSI PRODUKSI I	OPD Provinsi
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman semusim ***		%	1	1.583.666.000	1	574.500.000	4	1.428.014.000	4	3.586.180.000	SEKSI PRODUKSI I	OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****					1.583.666.000		574.500.000		1.428.014.000		3.586.180.000		OPD Provinsi
						Produksi tanaman semusim ****		Ton	29795	1.583.666.000	10808	574.500.000	26677	1.428.014.000	67280	3.586.180.000	SEKSI PRODUKSI I	OPD Provinsi
								%	1	231.825.000	1	100.000.000	4	281.000.000	4	612.825.000	SEKSI PRODUKSI I	OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****					231.825.000		100.000.000		281.000.000		612.825.000		OPD Provinsi
						Produksi tanaman tahunan ****		Butir	42500	231.825.000	16882	100.000.000	43285	281.000.000	102667	612.825.000	SEKSI PRODUKSI I	OPD Provinsi
						Produksi kelapa **		Ton	166687	475.000.000	167187	475.000.000	167689	600.000.000	501563	1.550.000.000		OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 1			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ***					475.000.000		475.000.000		600.000.000		1.550.000.000		OPD Provinsi

					Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kelapa ***		Ha	50	475.000.000	50	475.000.000	50	600.000.000	150	1.550.000.000		OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 1.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****				475.000.000		475.000.000		600.000.000		1.550.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah sarana produksi tanaman kelapa yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon ****		Batang	5000	250.000.000	5000	250.000.000	5000	300.000.000	15000	800.000.000		OPD Provinsi
					Jumlah sarana produksi tanaman tahunan lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon ****		Batang	3000	225.000.000	3000	225.000.000	3000	300.000.000	9000	750.000.000		OPD Provinsi
					Persentase peningkatan produksi kopi *		%	0,009	550.000.000	0,009	500.000.000	0,009	600.000.000	0,009	1.650.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi

		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN **						550.000.000		500.000.000		600.000.000		1.650.000.000		OPD Prov insi
						Produksi kopi **	Ton	25927	550.000.000	26005	500.000.000	26083	600.000.000	78015	1.650.000.000	Bidang Perkebunan	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ***					550.000.000		500.000.000		600.000.000		1.650.000.000		OPD Prov insi
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kopi ***	Ha	50	550.000.000	50	500.000.000	50	600.000.000	150	1.650.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****					550.000.000		500.000.000		600.000.000		1.650.000.000		OPD Prov insi
						Jumlah sarana produksi tanaman kopi yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon ****	Batang	25000	300.000.000	25000	250.000.000	25000	300.000.000	75000	850.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	OPD Prov insi

						Jumlah sarana produksi tanaman rempah dan penyegar lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon ****		Batang	10000	250.000.000	10000	250.000.000	10000	300.000.000	30000	800.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi tebu *		%	0,009	19.875.520.000	0,009	18.675.000.000	0,009	19.913.851.000	0,009	58.464.371.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN **							19.875.520.000		18.675.000.000		19.913.851.000		58.464.371.000		OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan **		%	3	1.525.520.000	3	650.000.000	3	1.613.851.000	3	3.789.371.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	OPD Provinsi
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ***							1.525.520.000		650.000.000		1.613.851.000		3.789.371.000		OPD Provinsi

					Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar siap salur ***	%	3	570.000.000	1	290.000.000	4	570.000.000	4	1.430.000.000	SEKSI BENIH	OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****			570.000.000		290.000.000		570.000.000		1.430.000.000		OPD Provinsi
					Tersedianya benih tanaman rempah dan penyegar siap tanam ****	Batang	4800	570.000.000	2400	290.000.000	4800	570.000.000	12000	1.430.000.000	SEKSI BENIH	OPD Provinsi
					Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman semusim siap salur ***	%	3	742.000.000	3	250.000.000	3	817.000.000	3	1.809.000.000	SEKSI BENIH	OPD Provinsi
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****			742.000.000		250.000.000		817.000.000		1.809.000.000		OPD Provinsi
					Tersedianya benih tanaman semusim siap tanam ****	Batang	131850	742.000.000	50000	250.000.000	145000	817.000.000	326850	1.809.000.000	SEKSI BENIH	OPD Provinsi
					Persentase kenaikan jumlah produksi benih	%	4	213.520.000	1	110.000.000	4	226.851.000	4	550.371.000	SEKSI BENIH	OPD Provinsi

					tanaman tahunan siap salur ***													
		3.27.02.1.0 2.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ****				213.520.000		110.000.000		226.851.000		550.371.000			OPD Prov insi
					Tersedianya benih tanaman tahunan siap tanam ****		Batang	460	213.520.000	506	110.000.000	556	226.851.000	1522	550.371.000	SEKSI BENIH		OPD Prov insi
					Produksi tebu **		Ton	2554553	18.350.000.000	2562216	18.025.000.000	2569903	18.300.000.000	7686672	54.675.000.000			OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ***					18.350.000.000		18.025.000.000		18.300.000.000		54.675.000.000			OPD Prov insi
					Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tebu ***		Ha	300	18.350.000.000	300	18.025.000.000	300	18.300.000.000	900	54.675.000.000			OPD Prov insi
		3.27.02.1.0 1.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ****				18.350.000.000		18.025.000.000		18.300.000.000		54.675.000.000			OPD Prov insi

					Jumlah bantuan pupuk anorganik untuk tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon ****	Kg	51000 0	17.500.00 0.000	1619 7	17.500.00 0.000	5100 00	17.500.00 0.000	1036 197	52.500.00 0.000		OPD Prov insi
					Jumlah sarana produksi tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon ****	Batang	10000	300.000.0 00	1000 0	200.000.0 00	1000 0	200.000.0 00	3000 0	700.000.0 00		OPD Prov insi
					Jumlah sarana produksi tanaman tebu yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon ****	Kg	30000	550.000.0 00	3000	325.000.0 00	3000 0	600.000.0 00	6300 0	1.475.000. 000		OPD Prov insi

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, utamanya dalam sub sektor pertanian dan perkebunan dijabarkan dalam Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD. Khusus indikator kinerja sub sektor pertanian dan perkebunan yang tidak tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah:

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024 – 2026

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
		2020	2021	2024	2025	2026	
Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	1,10	1,10	0,13	0,16	0,18	0,18
Persentase peningkatan produksi bawang merah	%	4,44	3,80	2,5	2,5	2,5	2,5
Persentase peningkatan produksi cabe	%	2,37	2	1,5	1,5	1,5	1,5
Persentase peningkatan produksi durian	%	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
Persentase peningkatan produksi jahe	%	-	-	3	3	3	3
Persentase peningkatan produksi melati	%	-	-	2	2	2	2
Persentase peningkatan produksi jagung	%	0,30	0,29	0,2	0,2	0,2	0,2
Persentase peningkatan produksi kedelai	%	1,20	2,75	0,2	0,2	0,2	0,2
Persentase peningkatan produksi padi	%	0,54	0,52	0,2	0,2	0,2	0,2
Persentase peningkatan produksi kelapa	%	0,30	0,44	0,009	0,009	0,009	0,009
Persentase peningkatan produksi kopi	%	2,51	2,57	0,009	0,009	0,009	0,009
Persentase peningkatan produksi tebu	%	0,30	0,49	0,009	0,009	0,009	0,009

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
		2020	2021	2024	2025	2026	
Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	1,10	1,10	0,13	0,16	0,18	0,18
Persentase peningkatan produksi bawang merah	%	4,44	3,80	2,5	2,5	2,5	2,5
Persentase peningkatan produksi cabe	%	2,37	2	1,5	1,5	1,5	1,5
Persentase peningkatan produksi durian	%	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
Persentase peningkatan produksi jahe	%	-	-	3	3	3	3
Persentase peningkatan produksi melati	%	-	-	2	2	2	2
Persentase peningkatan produksi jagung	%	0,30	0,29	0,2	0,2	0,2	0,2
Persentase peningkatan produksi kedelai	%	1,20	2,75	0,2	0,2	0,2	0,2
Persentase peningkatan produksi padi	%	0,54	0,52	0,2	0,2	0,2	0,2
Persentase peningkatan produksi kelapa	%	0,30	0,44	0,009	0,009	0,009	0,009
Persentase peningkatan produksi kopi	%	2,51	2,57	0,009	0,009	0,009	0,009
Persentase peningkatan produksi tebu	%	0,30	0,49	0,009	0,009	0,009	0,009
NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Angka	100,98	103,18	108,56	105,17	106,66	106,66
NTP Hortikultura	Angka	107,83	106,96	115,21	115,23	115,26	115,26
NTP Perkebunan Rakyat	Angka	88,47	95,46	103,34	103,36	103,39	103,39
NTP Tanaman Pangan	Angka	105,34	102,10	105,22	105,24	105,27	105,27
Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82,75	82,75	84	85	86	86
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,75	82,75	84	85	86	86
Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	-	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026, bersifat indikatif yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pertanian dan perkebunan yang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
2. Program dan Kegiatan merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan implementasi sesuai tupoksi yaitu : (1) Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; (3) Pembinaan dan fasilitasi bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; (4) Pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan; (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan penyuluhan; (6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Program yang direncanakan untuk perubahan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 meliputi : (1) Program Pengembangan dan penyediaan Sarana Pertanian; (2) Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Pertanian; (3) Program Penyuluhan; (4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; (5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang diampu oleh

Sekretariat dan Bidang-bidang yang ada di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

4. Perincian lebih lanjut tentang program, kegiatan, indikator *out put* kegiatan, kondisi awal dan target yang memuat pagu indikatif Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026 sesuai dengan Matrik.

B. Penutup.

1. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sebagai arah dan pedoman seluruh Unit Kerja di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun kedepan.
2. Dokumen Renstra ini secara normatif telah diupayakan memuat program dan Rencana Kerja dan seluruh tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi pelaksanaan dokumen Renstra maka diperlukan monitoring dan evaluasi oleh masing-masing Unit Kerja di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terkait dengan pentingnya pengawasan internal dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ungaran,

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah



SUPRIYANTO, SP., M.P.

NIP. 19671023 199701 1 002